

Rencana Strategis **RENSTRA** TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup..... 8

2.1.1. Tugas 8

2.1.2. Fungsi 8

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup..... 8

2.1.4. Uraian Tugas 11

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 23

2.2.1. Sumber Daya Aparatur..... 23

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset) 24

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup..... 41

2.4. Kelompok Sasaran Layanan..... 50

2.5. Mitra dalam Pemberian Pelayanan 51

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja..... 51

2.7. Kerjasama Daerah 51

2.8. Tantangan dan Peluang 52

2.8.1. Tantangan 52

2.8.2. Peluang 52

2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 53

2.10. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 54

2.11. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah..... 56

BAB III 59

 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup..... 59

 3.1.1. Tujuan..... 59

 3.1.2. Sasaran 59

 3.2. Strategi 61

 3.3. Arah Kebijakan 61

 3.4. Penahapan Renstra..... 64

BAB IV 65

 4.1. Program Perangkat Daerah 65

 4.2. Kegiatan Perangkat Daerah..... 68

 4.3. Sub Kegiatan Perangkat Daerah 73

 4.4. Sub Kegiatan Prioritas 81

BAB V 159

LAMPIRAN..... 161

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah RPJMD.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan memprioritaskan prinsip responsif gender dalam setiap aspek kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang dikembangkan mempertimbangkan perspektif gender, serta kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok gender. Melalui analisis gender yang mendalam, kami akan mengidentifikasi area di mana ketidaksetaraan masih terjadi dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

Sebagai percontohan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam pengelolaan sampah. Hal ini mencakup pemberdayaan perempuan dalam kegiatan daur ulang, pengumpulan sampah rumah tangga, dan pengambilan keputusan lingkungan, mengingat perempuan sering memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah domestik. Agar pengelolaan sampah responsif gender berjalan efektif, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan tentang kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, KSM

pengelola sampah, serta lembaga pemberdayaan perempuan juga dapat memperkuat program-program ini.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2045;
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2024

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai gambaran kinerja dan penjabaran atas permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, hingga sub yang terkait urusan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan data, informasi dan capaian kinerja organisasi yang sekurang-kurangnya berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra, dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Kerjasama daerah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Bab ini juga berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas.

2.1.1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan;
4. pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

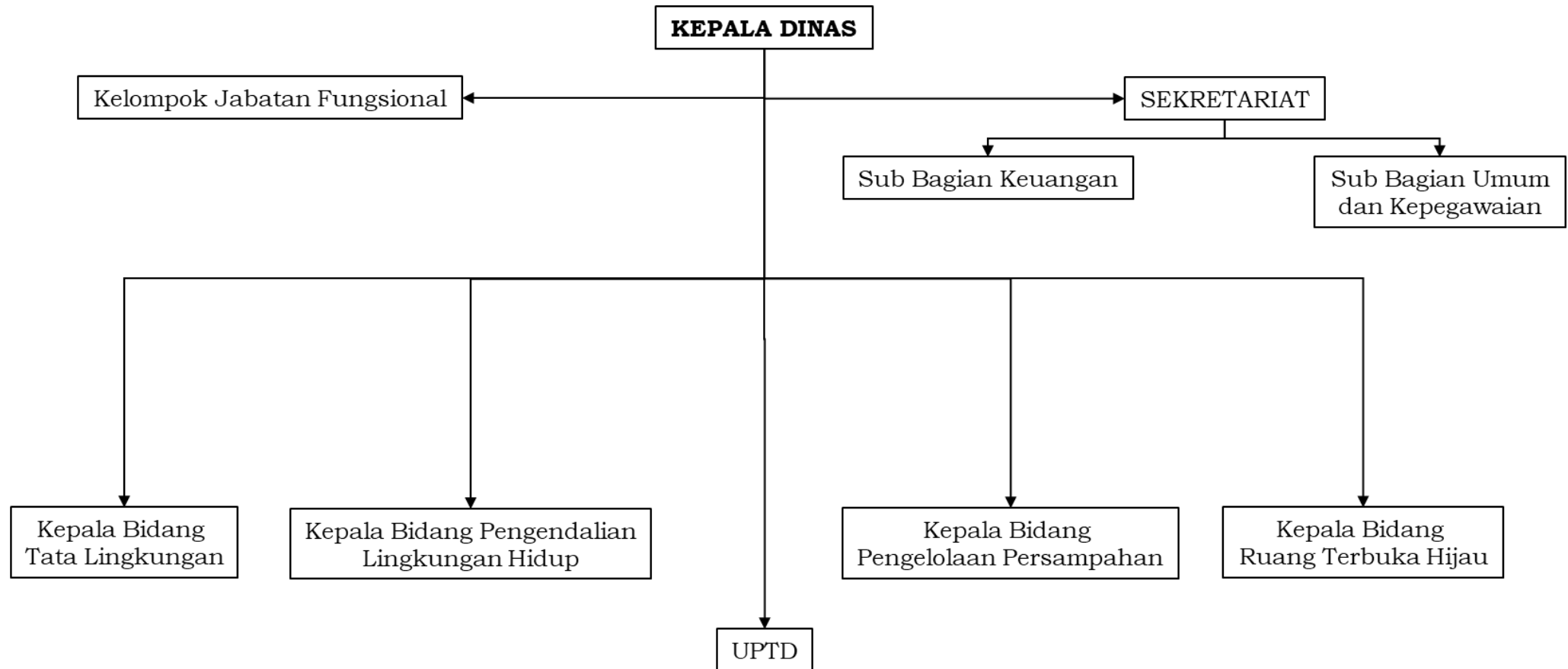
Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;

5. Bidang Pengelolaan Persampahan;
6. Bidang Ruang Terbuka Hijau;
7. UPTD terdiri dari :
 - a. Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Wilayah Ajibarang;
 - b. Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Wilayah Banyumas;
 - c. Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Wilayah Kembaran,
 - d. Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Wilayah Purwokerto;
 - e. Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Wilayah Sumpiuh;
 - f. Unit Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Wilayah Wangon;
 - g. Unit Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
 - h. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- 1) merumuskan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- 2) mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
- 3) mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup agar sasaran strategis dapat tercapai;
- 5) membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- 6) merumuskan kebijakan teknis pada kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau, Bidang Tata Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 7) menyelia melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau, Bidang Tata Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- 8) melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan bidang kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau, Bidang Tata Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 9) mengesahkan dan mengarahkan administrasi bidang kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau, Bidang Tata Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
- 11) melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sekretaris

- 1) menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan membimbing, melaksanakan pembinaan dan supervisi program kerja Sekretariat yang meliputi:
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d) organisasi dan tatalaksana;
 - e) kepegawaian;
 - f) pelayanan administrasi;
 - g) hukum;
 - h) kehumasan dan keprotokolan; dan
 - i) kearsipan dan perpustakaan
- 6) melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 7) memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan :
 - a) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - b) pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c) pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - d) fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak; dan
 - e) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan
- 6) melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
- 7) Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 9) melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi :
 - a) kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas;
 - b) pengelolaan kepegawaian berupa:
 - (1) penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan;

- (2) penyusunan formasi;
 - (3) pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan); dan
 - (4) ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, Pengumpulan Bahan dan Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi, dan lain-lain).
- c) organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain-lain;
 - d) pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain;
- 6) melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan;
 - 7) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 - 8) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 9) melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Tata Lingkungan

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Tata Lingkungan berdasarkan program kerja DLH serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Tata Lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait :
 - a) kajian dan analisis lingkungan hidup;
 - b) pembinaan dan fasilitasi dokumen lingkungan hidup; dan
 - c) pembinaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- 6) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 7) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja DLH serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasi dan membimbing pelaksanaan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - a) pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengelolaan bahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c) pengawasan lingkungan hidup;

- 6) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 7) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Pengelolaan Persampahan berdasarkan program kerja DLH serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan teknis mengkoordinasi dan membimbing pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Persampahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - a) sarana prasarana persampahan;
 - b) peningkatan kinerja persampahan;
- 6) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengelolaan Persampahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 7) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengelolaan Persampahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengelolaan Persampahan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Ruang Terbuka Hijau berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Ruang Terbuka Hijau secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Ruang Terbuka Hijau dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
 - d) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - e) pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- 6) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ruang Terbuka Hijau dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 7) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ruang Terbuka Hijau dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

- 8) memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ruang Terbuka Hijau serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terdiri dari tenaga ASN dan non ASN. Jumlah tenaga ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebanyak 149 orang (146 PNS dan 3 PPPK), sedangkan tenaga non ASN sebanyak 415 orang. Sehingga total jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebanyak 564 orang.

Berikut adalah data pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan, untuk tenaga ASN paling banyak dengan jumlah pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 38 orang, sedangkan untuk non ASN paling banyak dengan jumlah pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 232 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	ASN	Proporsi (%)	Non ASN	Proporsi (%)
Tidak Sekolah	-	-	3	0,72%
SD	38	25,50%	57	13,73%
SMP	31	20,81%	80	19,28%
SMA	16	10,74%	232	55,90%
D-I	0	0%	0	0%
D-II	0	0%	0	0%
D-III	26	17,45%	13	3,13%
S-1	36	24,16%	30	7,23%
S-2	2	1,34%	0	0%
S-3	0	0%	0	0%
Jumlah	149		415	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan golongannya, aparatur paling banyak dari golongan II yaitu sejumlah 97 orang pada Januari tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	1	-	1	0,67%
Golongan II	80	19	99	66,44%
Golongan III	24	18	42	28,19%
Golongan IV	3	1	4	2,68%
B. PPPK				
PPPK XI	2	0	2	1,34%
PPPK VII	0	1	1	0,67%
Jumlah	110	39	149	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Th.2025

Berikut adalah jumlah pegawai non ASN berdasarkan penempatan di bidang dan unit kerja:

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Bidang/Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	16
2	Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH)	44
3	Bidang Tata Lingkungan (TL)	6
4	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup (PLH)	1
5	Bidang Pengelolaan Persampahan (PP)	19
6	UPKP Ajibarang	27
7	UPKP Banyumas	23
8	UPKP Kembaran	22
9	UPKP Purwokerto	126
10	UPKP Sumpiuh	18
11	UPKP Wangon	23
12	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	3
13	UP TPST	89
TOTAL		417

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Barang milik daerah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Data Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Arm Rol	UNIT	2	Digunakan
2	Container Arm Rol	UNIT	5	Digunakan
3	Dump Truck	UNIT	30	Diusulkan Penjualan : 5 unit
4	Conveyor	UNIT	34	Tidak Berfungsi : 2 unit
5	Forklift	UNIT	1	Digunakan
6	Genset untuk Pencacah Plastik	UNIT	6	Digunakan
7	Sepeda Motor Roda Tiga	UNIT	142	Rusak Berat :5 unit ; Tidak Digunakan : 1 unit; Diusulkan Penjualan : 21 Unit
8	Becak Sampah	UNIT	108	Tidak Digunakan : 84 Unit
9	Gerobak Sampah	UNIT	583	Diserahkan ke Masyarakat : 405 Unit
10	Mesin Bag Opener (Mesin Penghancur Sampah Organik dan Pemilah Sampah)	UNIT	2	Digunakan
11	Mesin Blower	UNIT	14	Digunakan
12	Mesin Crusher Mini	UNIT	13	Digunakan
13	Mesin Pemilah Sampah	UNIT	18	Tidak Digunakan : 1 Unit
14	Mesin Pemusnah Sampah (Pirolisis)	UNIT	7	Digunakan
15	Mesin Penacacah RDF	UNIT	1	Digunakan
16	Mesin Pengayak Sampah	UNIT	17	Tidak Digunakan : 6 Unit
17	Mesin Pengering Sampah (Rotary Dryer)	UNIT	1	Digunakan
18	Mesin Penghancur Sampah Organik dan Pemilah Sampah (Gibrig)	UNIT	63	Tidak Digunakan : 5 Unit
19	Mesin Penghancur Sampah Plastik	UNIT	40	Tidak Digunakan : 6 unit
20	Mesin Pres Hidrolik	UNIT	22	Tidak Digunakan : 1 Unit
21	Shredder Machine	UNIT	2	Digunakan
22	Wheel Loader + Attachment	UNIT	1	Digunakan
23	Bangunan TPST	UNIT	11	Digunakan
24	Bangunan TPS3R	UNIT	8	Digunakan
25	Bangunan PDU	UNIT	10	Digunakan
26	Bangunan Rumah Kompos	UNIT	1	Digunakan
27	Bangunan Biodigester	UNIT	11	Diserahkan ke Sekolah
28	Bank Sampah	UNIT	6	Digunakan
29	TPA BLE	UNIT	1	Digunakan
TOTAL			1160	

Sumber : KIB B Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Tabel 2.5. Data Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
1	Bangunan Kantor UPKP Banyumas	1918	B	98	Jl. Sekolahan Kecamatan Banyumas	98
2	Bangunan Kantor UPKP Kembaran	1990	B	345,61	KP Wilayah Sokaraja	345,61
3	Bangunan Kantor UPT. TPA	1990	RB	48	Jl. Gunung Tugel, Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja	48
4	Bangunan Kantor UPKP Purwokerto	1992	B	75	Jl.Supriyadi No.55 Pwt	75
5	Bangunan Kantor UPKP Sumpiuh	1992	B	141	Jl. Pemotongan Pasar No 10, Kecamatan Sumpiuh	141
6	Bangunan Kantor UPKP Ajibarang	1992	B	35	Jl.Pasar Hewan Ajibarang, Kelurahan Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang	35
7	Gedung Kantor	1992	B	30	KP Wil. Jatilawang	30
8	Tugu Adipura (Taman Bunderan Air Mancur Berkoh)	1996	B	54	Kel.Berkoh Pwt.Selatan	54
9	Bangunan Gedung Kantor DLH (Exs. DCKKTR)	2005	B	152	Jl.Gerilya Barat No.05 Pwt	152
10	Bangunan Gedung Peralatan DLH	2008	B	91	Jl.Gerilya Barat No.05 Pwt	0
11	Kontruksi Gedung Kantor/TPA, TPS	2008	B	60	DLH	0
12	Kontruksi Gedung Kantor / MCK Umum	2008	B	24	DLH	0
13	Kantor UPT DPU	2008	B	0	DPU	0
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2009	B	126	Kantor Badan	0
15	Bangunan Depo Pengumpul Limbah B3	2021	B	40	Belakang Hanggar Kedungrandu	40
16	Bangunan Gudang RDF TPA BLE	2024	B		TPA BLE Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kaliori	359

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
17	Pekerjaan Perbaikan TPS	2014	B	0		0
18	Pekerjaan Pembangunan Bak Penampung Sampah Di Desa Darmakradenan	2014	B	15	Desa Darmakradenan	0
19	TPS Pekih	2014	B	56,26	Jl. Jalan Jendral Sudirman	0
20	Pekerjaan Pembangunan TPS Purwonegoro	2014	B	166,6	TPS Purwonegoro	0
21	Pembangunan TPS dan TPST Kabupaten Banyumas	2014	B	56,26	di Kabupaten banyumas	0
22	Pekerjaan Pembangunann Pos UKP sokaraja	2014	B	30	Pos UKP sokaraja	0
23	Perbaikan/ Pembangunan TPS	2014	B	0		0
24	TPS A. Yani	2014	B	90		0
25	TPS Berkoh	2014	B	125		0
26	TPS Berkoh	2012	RB	1	Depan Kuburan Berkoh	1
27	Pembangunan TPS Desa Kembaran	2012	RR	54	TPS Desa Kembaran	0
28	TPS	2013	B	0		0
29	TPS	2013	B	56,26		0
30	Bank sampah	2015	B	18	Rejasari	18
31	TPS Kel. Arcawinangun	2016	B	121,25	TPS Kel. Arcawinangun	25
32	TPST di Kantor UKP Purwokerto	2016	B	428	TPST di Kantor UKP Purwokerto	120
33	TPS di Rw. 06 Kel. Karangklesem	2016	B	78,75	TPS di Rw. 06 Kel. Karangklesem	0
34	Rumah Kompos	2021	B	2832	Rumah Kompos Kelurahan Grendeng	1026
35	Bangunan TPST	2021	B	3970	TPA Wlahar Wetan	3970
36	Bangunan Workshop Persampahan	2022	B	1	Jl.Gerilya Barat No.05 Pwt	1
37	Bangunan PDU Pasir Kidul	2022	B	1	Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat	212,4

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
38	Bangunan PDU Karangkelse m	2022	B	1	Kelurahan Karangklessem Kecamatan Purwokerto Selatan	212,4
39	Bangunan TPS3R Kedungrandu II (baru)	2022	B	1	Dekat Hanggar Kedungrandu lama	600
40	Bangunan PDU Bancarkemb ar	2022	B	1	Jl. Ringin Tirto Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara	1
41	Bangunan PDU Rejasari	2023	B		Kel. Rejasari	212,4
42	Bangunan TPS3R Arcawinangu n	2023	B		Kel. Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur	1
43	Bangunan TPS3R Rempoah	2023	B		Kel. Rempoah Kecamatan Baturraden	957,6
44	Bangunan TPS3R Sokaraja Kulon	2023	B		Kel. Sokaraja Kulon	957,6
45	Bangunan TPS3R Kedunggede Banyumas	2023	B		Desa Kedunggede Banyumas	957,6
46	Bangunan TPS3R Sumampir	2023	B		Jl. Riyanto, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara	18
47	Bangunan TPST3R Purwokerto Kulon	2023	B		Kelurahan Purwokerto Kulon	212,4
48	Bangunan PDU Pabuwaran	2024	B		Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara	283,2
49	Bangunan TPST Cilongok	2024	B		Desa Cilongok Kecamatan Cilongok	957,6
50	Bangunan Kantor UPKP Wangon	2005	B	36	Desa Banteran Kecamatan Wangon	36
51	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	1	Sebelah Timur Terminal	1
52	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	1	Depan SMK 1 Banyumas	1
53	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Komplek Pasar Sokaraja	0
54	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	1	Kalikidang	1

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
55	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Mersi	0
56	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Karang Klesem	0
57	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Sokanegara	0
58	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Purwokerto Lor	0
59	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Purwokerto Kulon	0
60	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	1	Komplek Terninal Bus Purwokerto	1
61	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Teluk	0
62	Bangunan PDU Purwokerto Wetan	2005	B	1	Kelurahan Purwokerto Wetan	120
63	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Purwonegoro	0
64	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Karangwangkal	0
65	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Grendeng	0
66	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Teluk	0
67	Lain-Lain (Transfer Depo)	2005	B	0	Kelurahan Rejasari	0
68	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Karangklesem	0
69	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Teluk	0
70	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Tanjung	0
71	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Tanjung	0
72	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Karanglewas Kidul	0
73	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Rejasari	0
74	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Kober	0
75	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Bobosan	0
76	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Purwonegoro	0
77	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Purwonegoro	0
78	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Purwonegoro	0
79	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Purwonegoro	0
80	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kelurahan Purwonegoro	0

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
81	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kelurahan Bancarkembar, Dukuhbandong	1
82	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kelurahan Bancarkembar, Jl. Ringin Tirto	1
83	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sumampir, perumahan sumampir griya satria	1
84	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kel. Sumampir	0
85	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kel. Pabuaran	0
86	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Berkoh, depan dealer mobil nissan	1
87	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Berkoh, sebelah dealer toyota	1
88	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Berkoh, Dekat Taman Satria Berkoh	1
89	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kel. Berkoh	0
90	Lain-lain (TPS)	2007	B	0	Kel. Berkoh	0
91	TPS Sokanegara	2007	B	1	Sebelah SMK Kstarian	1
92	TPS Sokanegara	2007	B	1	Jl. Ahmad Yani / Belakang RS Margono Geriatric	1
93	TPS Sokanegara	2007	B	1	Jl. Karang Kobar, Depan Bakso Kardi	1
94	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sokanegara, belakang polres	1
95	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sokanegara, Jl. Gereja	1
96	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sokanegara, Jl. Gereja	1
97	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sokanegara, Jl. Pungkuran	1
98	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sokanegara, pasar cikebrok	1
99	Lain-lain (TPS)	2007	B	1	Kel. Sokanegara, depan dokter mambo	1
100	TPS Bantarsoka	2007	B	1	Depan Pasar Pon	1
101	TPS Bantarsoka	2007	B	1	Perum. Bantarsoka	1
102	Transferdipo	2009	B	0	Banyumas	0
103	Transferdipo	2009	B	0	Kalikidang	0
104	Pembuatan Semi Transfer Dipo	2009	B	36	Kelurahan Purwonegoro (Belakang Kantor BPBD	36

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT Kab. Banyumas)	LUAS (M ²)
105	Bangunan Gedung (Taman Kehati)	2012	B	108	Desa Kemutug Lor Kec. Baturraden	108
106	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri 1 Purwokerto	1,7
107	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri 2 Purwokerto	1,7
108	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMK Negeri 3 Purwokerto	1,7
109	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri Sokaraja	1,7
110	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri Banyumas	1,7
111	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri Rawalo	1,7
112	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri Jatilawang	1,7
113	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMA Negeri Ajibarang	1,7
114	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SMP Negeri 9 Purwokerto	1,7
115	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SD Negeri 2 Sokaraja Kulon	1,7
116	Bangunan Pengolah Sampah Organik (Biodigester)	2015	B	1,7	SD Negeri Locondong, Rawalo	1,7
117	Konstruksi/Ta man Segitiga Ajibarang	2009	B	8000	Kecamatan Ajibarang	1

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
118	Taman Kota Kecamatan Banyumas	2009	B	1	Alun-Alun Banyumas	1
119	Taman TPA Gunung Tugel	2009	B	1	Kec.Patikraja	1
120	Taman Sokaraja dan Tambak	2009	B	420	Kec. Sokaraja dan Kec. Tambak	0
121	Taman Median Jln. Gerilya Barat	2009	B	0	Kec.Pwt. Selatan	1
122	Taman Kota Kecamatan Purwokerto Timur	2009	B	1	Alun-Alun Purwokerto	1
123	Bangunan Median Jalan Suparno Purwokerto (Perbaikan)	2015	B	1600	Perbaikan Median Jalan Suparno Purwokerto	0
124	Kontruksi/Pe mbelian Taman/Medi an JLn.Perbaika n Taman Tugu Batas Lumbir	2010	B	486	Jl. Lumbir - Bandung, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	1
125	Bangunan Lapangan Sumpiuh	2017	B	112,5	Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh	1
126	Bangunan Lapangan Gelora Satria Karanglewas	2017	B	13066,5	Karanglewas	0
127	Bangunan Lapangan Mars	2017	B	113,5	Jl Supriyadi samping RS Hidayah, Kelurahan Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur	50
128	Penataan Lapangan Purwokerto Kidul	2017	B	0	Kelurahan Purwokerto Kidul	1
129	Bangunan Tembok Keliling Lapangan Kelurahan Sumampir	2017	B	8414,6	Jl. Riyanto Kelurahan Sumampir	0
130	Bangunan RTH (Taman Kec.Cilongok)	2019	B	77,12	Kecamatan Cilongok	77,12
131	Bangunan RTH (Lapangan Kradenan, Kecamatan Sumpiuh)	2019	B	125,7	Lapangan Kradenan, Sumpiuh	125,7
132	Bangunan RTH (Lapangan	2019	B	340	Lapangan Kusuma Kel.Sumpiuh	340

NO	NAMA / JENIS BARANG Kusuma Kel.Sumpiuh)	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
133	Bangunan RTH	2019	B	0	Jl. Kampus, Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara	1
134	Bangunan RTH	2019	B	10935	Jl Kabupaten Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur	10935
135	Bangunan RTH	2019	B	0		0
136	Bangunan RTH (Lapangan Kusuma Kel.Sumpiuh)	2019	B	340	Lapangan Kusuma Jl. Kusuma, Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh	340
137	Bangunan Taman	2019	B	0	jalan jenderal soedirman	1
138	Bangunan RTH (Bundaran Andhang Pangrenan)	2019	B	572	Jl Gerilya, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan	572
139	Bangunan RTH (Taman Median Underpass)	2019	B	1	Underpass Soedirman Bantarsoka, Purwokerto Barat	1
140	Gedung Jaga TPA Kaliori	2005	B	54	TPA Kaliori Kecamatan Kaliori	54
141	Gedung Jaga dan Bangunan TPA Tipar Kidul	2005	B	72	Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang	72
142	Bangunan Pergola	2017	B	30	Jl Raya Kemutug Lor Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden. (Taman Kehati)	1
143	Taman Pintu Masuk Kota	2009	B	1	Karanglewas (Pertigaan Monumen Jendral Soedirman)	1
144	Ruang Terbuka Hijau	2018	B	13139,64	Sokanegara	0
145	Bangunan TPS3R Kedungrandu I (lama)	2018	B	974	Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja	974
146	Rumah Magot	2022	B	1	Dekat TPST Kedungrandu	1
147	Rumah Magot	2023	B		Kec. Wangon	50

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
148	Taman Edukasi Sumber Daya Air Sungai Kranji	2017	B	2160,24	Jl. Jend. Soedirman	0
149	Bangunan TPST Tipar Kidul Ajibarang	2017	B	1359,55	Tipar Kidul Ajibarang	1359,55
150	Bangunan TPST Karangcegak	2018	B	2900,29	sumbang	566
151	Bangunan Hanggar	2018	B	2178,75	Desa Banteran Kecamatan Wangon	1276,8
152	Bangunan Gedung Posko Bersama di Taman Kota Sumpiuh	2019	B	0	Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh	18
153	Bangunan TPA Banyumas	2023	B		Dusun 1 Wlahar Wetan Kec. Kalibagor	19234
154	Bangunan TPS Berkoh	2017	B	12,5	Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan	50
155	Pavingisasi Makam Syech Makdum Wali	2011	B	30	Kec. Karanglewas	30
156	Tembok Keliling Makam Desa Tambaksari Kec. Kembaran	2011	B	0	Desa Tambaksari Kec. Kembaran	0
157	Pergola Taman	2014	B	1	Kantor Kemutug Lor	0
158	Pergola Taman	2014	B	1	Kantor Kemutug Lor	0
159	Pergola Taman	2014	B	1	Kantor Kemutug Lor	0
160	Pergola Taman	2014	B	1	Kantor Kemutug Lor	0
161	Pergola Taman	2014	B	1	Kantor Kemutug Lor	0
162	Pergola Taman	2014	B	1	Kantor Kemutug Lor	0
163	Bangunan Bank Sampah Kelurahan Purwokerto Lor	2014	B	15	Kelurahan Purwokerto Lor	0
164	Bangunan Bank Sampah Kelurahan Sokanegara	2014	B	15	KELURAHAN SOKANEGARA	0
165	Bangunan Bank Sampah BLH	2014	B	30		0

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
166	Bangunan green house	2014	B	24		0
167	Bangunan Bank Sampah Kelurahan Purwonegoro	2014	B	231,54	Kelurahan Purwonegoro	0
168	Bangunan TPS Sumampir	2015	B	231,74	Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara	1
169	Bangunan Taman Lalu Lintas	2015	B	12000	Terminal Bulupitu, Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	1
170	Bangunan RTH (Taman Kota Sumpiuh)	2015	B	16,57	Taman Kota Sumpiuh	16,57
171	Bangunan TPST Sumpiuh	2015	B	54,6	Kec. Sumpiuh	1276,8
172	Bangunan TPST Berkoh	2015	B	175,89	Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan	212,4
173	Bangunan Gedung Bank Sampah	2016	B	25	Kelurahan Karangpucung	0
174	RTH Ajibarang	2016	B	500	RTH Ajibarang Tahap II	0
175	Bangunan Talud	2018	B	282	Banyumas	0
176	RTH Purwanegara	2018	B	11984	Kelurahan Purwanegara	0
177	RTH Rawalo	2018	B	398,35	Kecamatan Rawalo	0
178	RTH Karanglewas	2018	B	87,32	Karanglewas	0
179	Bangunan TPST	2019	B	1	windu negara	1
180	Bangunan TPST Wangon	2019	B	1	Desa Banteran, Kecamatan Wangon	1276,8
181	Bangunan TPST Wangon	2019	B	1	Desa Banteran Kecamatan Wangon	1276,8
182	Bangunan PDU	2019	B	0	Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Lor	212,4
183	Bangunan Hanggar	2019	B	0	Desa Kradenan Kecamatan Sumpiuh	1276,8
184	Bangunan Gedung TPST	2019	B	0	Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja	974,4
185	Bangunan Rumah Kompos	2019	B	0		0

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
186	Bangunan RTH	2019	B	0	dari Jl Kh Abdul Malik hingga Jl. Adipati Mersi	1
187	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
188	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
189	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
190	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
191	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
192	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
193	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
194	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
195	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
196	Bangunan Sumur Resapan	2019	B	0		0
197	Bangunan RTH (Taman Median Jalan Ahmad Yani)	2019	B	1	Jalan Ahmad Yani	1
198	Bangunan Gedung TPST	2019	B	0	Desa Banteran Kecamatan Wangon	1276,8
199	Bangunan Pot Bunga	2019	B	0	jalan sudirman	0
200	Bangunan RTH	2019	B	0	Jl. S. Parman Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan	1
201	Bangunan PDU	2019	B	0	Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara	283,2
202	Bangunan PDU	2019	B	0	Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara	283,2
203	Bangunan RTH	2019	B	0	Jl. Kyai H. Wahid Hasyim, Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan	1

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
204	Bangunan RTH	2019	B	0	Jl Raya Pengasinan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan	50
205	Bangunan RTH	2019	B	0	Sedagaran, kec. Banyumas	0
206	Bangunan Taman	2019	B	0	Sepanjang Jl. Gerilya	1
207	Bangunan Taman	2019	B	0	Jl. Kawedanan Belakang Dinas DPMPTSP Kab. Banyumas	1
208	Bangunan PDU	2021	B	1453,91	Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur	638,4
209	Bangunan Taman Ahmad Yani	2021	B	1	Jalan A. yani	1
210	Bangunan RTH Kebun Bibit Jl. Soekarno	2022	B	1	Jl. Soekarno	1
211	Bangunan RTH Perumahan Teluk	2022	B	1	Perumahan Teluk	1
212	Taman Segitiga Kebocoran	2022	B	1	Desa Kebocoran	1
213	Taman Segitiga Karangsalam	2022	B	1	Desa Karangsalam	1
214	Taman Segitiga Beji Pasar Cermi	2022	B	1	Desa Beji	1
215	RTH Kel. Purwokerto Kulon	2023	B		Kel. Purwokerto Kulon	1
216	Taman Jalan Bung Karno	2023	B		Jalan Bung Karno	1
217	RTH Lapangan Kel. Tanjung	2024	B		Kelurahan Tanjung	9100
218	RTH Lapangan Kel. Bobosan	2024	B		Kelurahan Bobosan	9262
219	RTH Perumnas Teluk	2024	B		Belakang SD N 5 Teluk	2800
220	Bangunan Pot Pelindung Pohon Jalan Jendral Soedirman	2024	B		Jalan Jendral Soedirman	0,9
221	Bangunan Pot Pelindung Pohon Jalan Dr. Angka	2024	B		Jalan Dr. Angka	1,6
222	Bangunan Taman (Pot	2013	B	1	Jalan gatot subroto	1

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
	Jalan Gatot Subroto)					
223	Bangunan Taman (Pot Jalan Supardjo Rustam)	2013	B	143	Jalan Suparjo Rustam	143
224	Pot Di Depan Taman Balai Kumambang & tanamannya	2014	B	0,5	Depan Taman Balai Kumambang	0,5
225	Bangunan Kantor TPA BLE	2022	B	1	Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kaliori	7009,54
226	Tugu Gada Rujak Polo	2020	B		Jl. Jend. Sudirman	1
227	Konstruksi Bangunan Monumen	2008	B	0	DLH	0
228	Konstruksi Bangunan Monumen	2008	B	0	DLH	0
229	Bangunan Tugu Batas Banyumas di Tambak	2015	B	380	Jl. Nasional Kecamatan Tambak (dekat perbatasan) Kabupaten Banyumas	1
230	Air Mancur Taman Segitiga Tugu Jam	2017	B	46,76	Segitiga Tugu Jam Purwokerto	1
231	Taman Masuk TPA Kaliori	2017	B	32000	TPA Kaliori Kecamatan Kaliori	1
232	Lapangan Mars	2018	B	16393	Mersi, Purwokerto Timur	1
233	Taman Asmaul Husna (Berkoh)	2018	B	898,15	Kelurahan Berkoh	1128
234	Taman Kecamatan Sumbang	2018	B	398,93	Kantor Kecamatan Sumbang	1
235	Taman Kober	2018	B	4,6	Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Utara	1
236	Taman Depan Kantor Kecamatan Karanglewas	2018	B	87,32	Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas	1
237	Taman dan Tembok Keliling Lapangan Kelurahan Sokanegara	2018	B	17548	Lapangan Kelurahan Sokanegara	0
238	Lapangan Pabuaran	2018	B	9559	Kelurahan Pabuaran Kecamatan	1

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT Purwokerto Utara	LUAS (M ²)
239	Bangunan monumen	2007	B	300	Jl Gerilya	0
240	Bangunan Taman Monumen Satria	2007	B	125	Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan	125
241	Bangunan monumen	2007	B	150	Jl.Soedirman	0
242	Bangunan monumen	2007	B	425	Jl.Gerilya	0
243	Bangunan Tembok Keliling Makam Pekih Kec. Purwokerto Barat	2015	B	400	Pembangunan Tembok Keliling Makam Pekih Kec. Purwokerto Barat	0
244	Bangunan Tembok Keliling Makam Sitapen Kec. Purwokerto Timur	2015	B	300	Pembangunan Tembok Keliling Makam Sitapen Kec. Purwokerto Timur	0
245	Bangunan Tembok Keliling Makam di Rt. 03, Rt06 Rw.05 Kelurahan Kedungwulu h Kec. Purwoke	2015	B	600	Pekerjaan Pembangunan Tembok Keliling Makam di Rt. 03, Rt06 Rw.05 Kelurahan Kedungwuluh Kec. Purwoke	0
246	Perbaikan taman dan kansten median tengah jln gerilya timur	2013	B	3000	e. Perbaikan taman dan kansten median tengah jln gerilya timur	0
247	Median tengah jalan yos sudarso kr. Lewas	2013	B	1330,38	Median tengah jalan yos sudarso kr. Lewas	1
248	Perbaikan taman segitiga karanglewas	2013	B	0	Jl. Ajibarang Secang Kelurahan Karanglewas Kecamatan Karanglewas	1
249	Perbaikan taman segitiga banyumas	2013	B	0	Jl. Bhayangkara Kecamatan Banyumas	1
250	Taman Bundaraan air mancur berkoh	2013	B	0	Perbaikan Taman Bundaraan air mancur berkoh	1
251	Bangunan Kebun Bibit DCKKTR	2015	B	400	Pembangunan Kebun Bibit DCKKTR	0
252	Bangunan Papan Nama	2015	B	2758	Renovasi Papan Nama Alun- Alun Jatilawang	1

NO	NAMA / JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI BANGUNAN (B,KB,RB)	LUAS LANTAI (M ²)	LETAK / LOKASI ALAMAT	LUAS (M ²)
	Alun-Alun Jatilawang					
253	Pot Bunga	2016	B	70	Purwokerto	0
254	Bangunan Tembok Keliling Makam Kelurahan Kedungwulu h	2017	B	23000	Kelurahan Kedungwuluh	0
255	Bangunan Tembok Keliling Makan Kelurahan Karangpucun g	2017	B	250	RW 08 Kelurahan Karangpucung Purwokerto	0
256	Bangunan Tembok Keliling Makam Kelurahan Kebokura	2017	B	300	Kelurahan Kebokura Kec. Sumpiuh	0
257	Bangunan Tembok Keliling Makam Kelurahan Karangpucun g	2017	B	5600	Karangpucung RW 10 Kec. Purwokerto Selatan	0
258	Bangunan Monumen	2009	B	500	Monumen Jendral Soedirman di Kec. Karanglewas	0
259	Pagar Keliling TPS3R Kel. Kranji	2023	B		Kel. Kranji Purwokerto Timur	207
260	Bangunan Pot Bunga dan Tanaman di Kota Purwokerto	2015	B	40	Pengadaan Pot Bunga dan Tanaman di Kota Purwokerto	0
261	Taman Segitiga Arcawinangu n dan Pembanguna n Taman di Perempatan Dukuhwaluh (Perbaikan)	2015	B	3250	Perbaikan Taman Segitiga Arcawinangun dan Pembangunan Taman di Perempatan Dukuh waluh	1
262	Bangunan Taman dan PKL di Utara Alun-Alun Banyumas	2015	B	25221,27	Pembangunan Taman dan PKL di Utara Alun- Alun Banyumas	0
263	Bangunan Taman Median Jalan Sudirman	2015	B	600	Pekerjaan Pemeliharaan Taman Median Jalan Sudirman	0
264	Bangunan RTH (Taman Pangripta Brubahan Kranji)	2017	B	8631,36	Kelurahan Kranji Purwokerto	8631,36

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

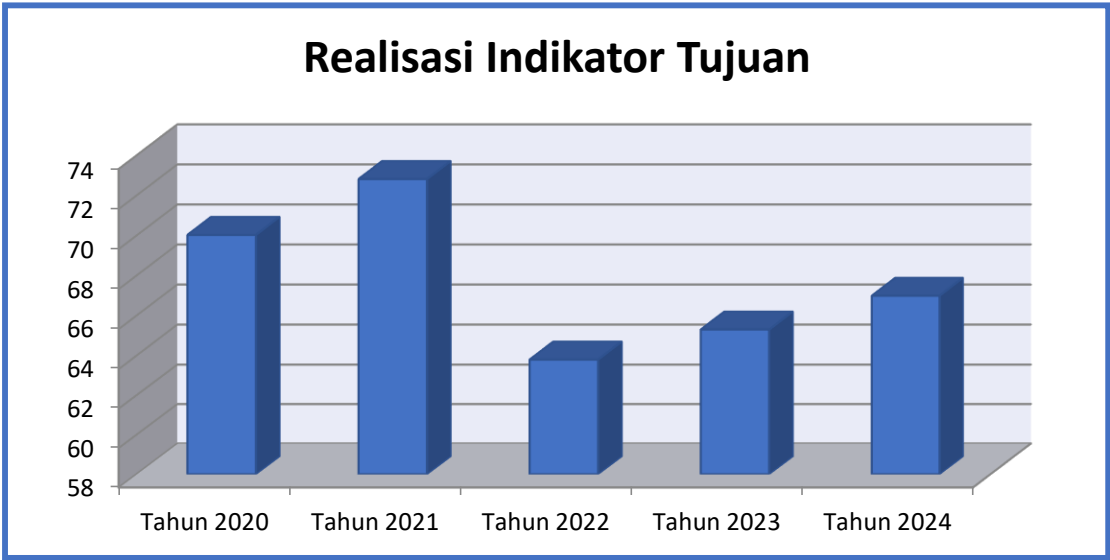
Kinerja penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup menggambarkan keberhasilan dalam mengatur urusan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator kinerja utamanya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut. Nilai IKLH Kabupaten/Kota merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, yang dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

Tabel 2.6. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	70,04	72,83	63,81	65,31	67



Gambar 3.1. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH tahun 2022 menurun dari tahun 2021 dan tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan metode perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

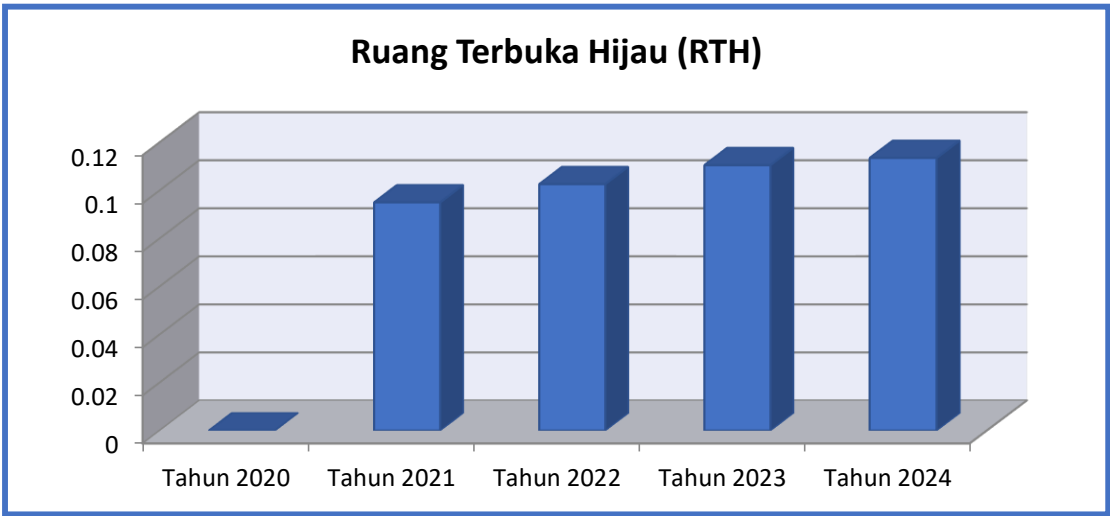
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan capaian IKLH tahun 2024 meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Target IKLH yang tercapai menunjukkan peningkatan respon baik dan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam urusan lingkungan hidup. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi prioritas penanganan sehingga persentase RTH wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Namun demikian persentasenya masih dibawah ketentuan Undang-undang Penataan Ruang yang mengamanatkan persentase RTH perkotaan sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Tabel 2.7. Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RTH Publik	%	N/A	9,5	10,26	11,05	11,35



Gambar 3.2. Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tahun 2020, indikator yang digunakan adalah persentase peningkatan RTH publik, dengan target 2% dan realisasi sebesar 1,69%. Mulai tahun 2021, indikator disesuaikan menjadi persentase

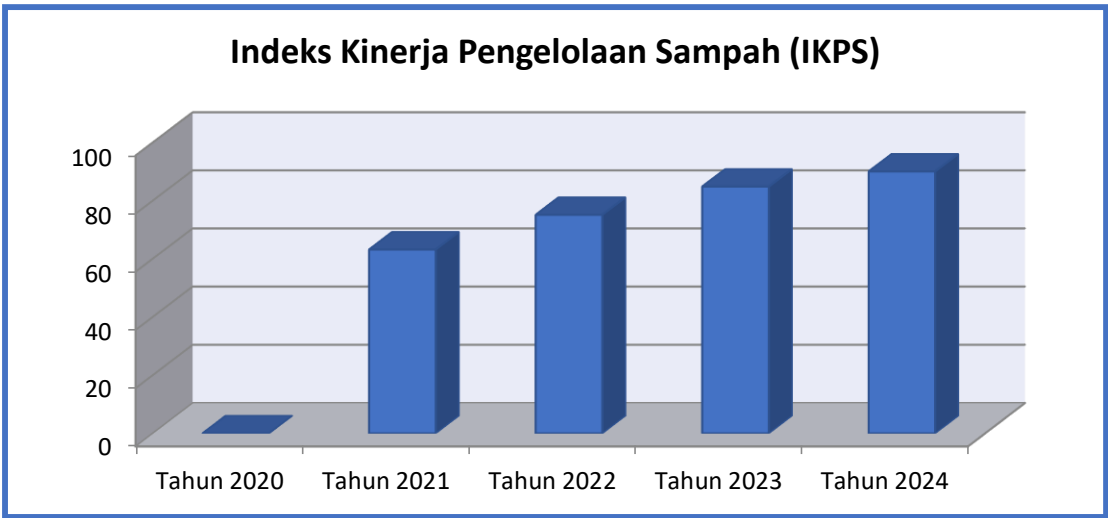
RTH publik. Berdasarkan perubahan tersebut maka capaian antara tahun 2020 dengan tahun 2021 tidak dapat dibandingkan. Luas RTH publik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2021 ke 2022 naik sebesar 0,76% dan 2022 ke 2023 naik sebesar 0,79%. Penambahan luas RTH merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam memenuhi target RTH publik sebesar 20% yang diamanatkan undang-undang.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Kinerja pengelolaan sampah diukur dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yang merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah. Kabupaten Banyumas dinilai berhasil melakukan pengelolaan sampah karena tidak menggunakan TPA konvensional sehingga nilai pengelolaan yang diperoleh dalam IKPS menjadi tinggi.

Tabel 2.8. Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	N/A	63,17	75,11	84,83	66,77



Gambar 3.3. Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Berdasarkan hasil reviu dari Kementerian Lingkungan Hidup, dilakukan perhitungan ulang terkait nilai IKPS sesuai dengan memperbarui koefisien timbulan sampah. Perubahan tersebut

menyebabkan perbedaan capaian kinerja sehingga dalam penetapan target indikator Renstra tidak lagi mengikuti tren tahun sebelumnya tetapi berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan hasil revidi yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan ulang nilai IKPS tahun 2024 sebesar 66,77.

Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta pengadaan air di Kabupaten Banyumas menyumbang peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 56,52 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan penerapan ekonomi hijau yang memiliki peran krusial dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sudah cukup baik. Berdasarkan data pada aplikasi AKSARA sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Banyumas telah berkontribusi terhadap capaian penurunan emisi GRK sebesar 58.120,042 TonCO₂ eq. Kontribusi penurunan emisi GRK paling dominan ada pada sektor pengelolaan limbah khususnya sektor persampahan.

Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan

Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi dokumen lingkungan hidup dalam penyelenggaraan kewenangannya. Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang menggantikan Peraturan Bupati yang berlaku sebelum era Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan jenis dokumen lingkungan yang diwajibkan mengalami perubahan menjadi lebih banyak yang diwajibkan hanya memiliki SPPL dibandingkan dengan UKL-UPL dan Amdal, sehingga mempengaruhi jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan. Selain hal tersebut penentuan kewenangan pemeriksaan dan penerbitan persetujuan lingkungan juga sebagian besar dialihkan kepada Gubernur dan Menteri.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Tahun 2020, indikator yang digunakan adalah Persentase ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan, dengan target 70% dan realisasi 70%. Tahun 2021 s.d. 2023, indikator yang digunakan adalah Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan dengan target 5%, capaian tahun 2021 sebesar 6,15%, capaian tahun 2022 sebesar 5%, dan capaian tahun 2023 sebesar 7,14% yang berarti telah memenuhi target. Mulai tahun 2024, indikator disesuaikan menjadi Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan. Capaian kinerja tata kelola lingkungan hidup tercapai 100% dimana semua permohonan Rekomendasi Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Surat Layak Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah semua dapat difasilitasi dan mendapatkan rekomendasi baik di tahun 2023 maupun tahun 2024.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator dan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke			Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Peringkat Kinerja
					2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2024	2025 Triwulan I		
[Tujuan] Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Nilai	65.31	64.25	64.52	75.49	64.25	67	0	104.28	0	104.28	Sangat Tinggi
[Sasaran] Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke			Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Peringkat Kinerja
					2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2024	2025 Triwulan I		
[Program] PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH	%	85.71	83	85.85	82	83	92.31	92.31	111.22	111.22	111.22	Sangat Tinggi
[Sasaran] Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik	Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik	%	11.05	10.34	11.10	10.15	10.34	11.35	11.35	109.77	109.77	109.77	Sangat Tinggi

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke			Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Peringkat Kinerja
					2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2024	2025 Triwulan I		
[Program] PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik	%	11.05	10.34	11.10	10.32	10.34	11.35	11.35	109.77	109.77	109.77	Sangat Tinggi
[Sasaran] Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS			77	89.6	89.6	77	66.77	-	74.52	-	116.94	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan area layanan persampahan	%	90.12	88	90.25	87	88	90.45	90.45	102.78	102.78	102.78	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani terkelola	%	99.31	100	99	100	100	98	98	98		98	Tinggi
[Sasaran] Optimalnya pengendalian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air		51.79	54.05	51.80	71.78	54.05	55.14		102.02		102.02	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		47.59	42.75	47.60	62.87	47.46	47.46		111.02		111.02	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Udara		87.45	85.35	85.47	85.77	88.58	88.58		103.78		103.78	Sangat Tinggi

Rankhir Renstra DLH 2025-2029

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Pada RKPD Tahun Ke			Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Peringkat Kinerja
					2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2024	2025 Triwulan I		
[Program] PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
[Program] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: E-Monev Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup membuat inovasi yang digunakan untuk mempercepat pencapaian tujuan. Inovasi yang tepat dapat memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Jadi Uang) : inovasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dimana sampah dikelola secara komprehensif dan terintegrasi.
- Salinmas (Sampah Online Banyumas) : inovasi untuk memberikan reward kepada masyarakat yang telah melakukan pengelolaan sampah organik dari sumbernya
- Avatar Lablingmas : merupakan inovasi pelayanan laboratorium untuk pengujian kualitas lingkungan
- DIGITAMAS (Digital Mapping Kualitas Air Permukaan Kabupaten Banyumas) : inovasi pelayanan publik penyampaian informasi kualitas air permukaan Kabupaten Banyumas berbasis data grafis
- SIDATA HUJAN LABLINGMAS : Inovasi yang menyajikan data hasil pengujian laboratorium secara lebih informatif, interaktif, dan mudah dipahami
- Goleti Emas : Inovasi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk ProKlim (Program Kampung Iklim) dan mempromosikan ProKlim (Program Kampung Iklim)
- Penyajian informasi lingkungan hidup : merupakan inovasi yang dibuat untuk menampilkan tentang informasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup
- Digitalisasi data : merupakan inovasi pelayanan publik maupun pelayanan intern berupa data aset, SPJ dan pengelolaan arsip.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memberikan layanan di bidang lingkungan hidup pada semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, dan masyarakat.

2.5. Mitra dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

- a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan pengelolaan sampah;
- b. Perusahaan yang memiliki dampak lingkungan;
- c. Sekolah-sekolah terkait adiwiyata serta Perguruan Tinggi terkait dengan ProKlim dan inovasi mesin-mesin pengolah sampah;
- d. Organisasi lingkungan yang bekerjasama dalam pelestarian lingkungan;
- e. Stakeholder lain yang berperan dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup.

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja dapat berupa:

- a. Pengelolaan sampah : BUMD dapat membantu dalam pengelolaan sampah dengan teknologi yang lebih baik;
- b. Pengembangan energi terbarukan : BUMD dapat berinvestasi dalam proyek energi terbarukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil;
- c. Penghijauan dan konservasi : BUMD dapat mendukung program penghijauan dan konservasi alam;
- d. Pengelolaan air : BUMD dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya air untuk memastikan kualitas dan ketersediaan air yang baik.

2.7. Kerjasama Daerah

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Kerjasama daerah yang meliputi pengembangan kemitraan dalam bidang lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan keberlanjutan, melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, pemulihan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan.

2.8. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi tantangan dan peluang.

2.8.1. Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang semakin banyak dapat meningkatkan pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan;
2. Kegiatan ekonomi dan berkembangnya industri berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Masih lemahnya sanksi penegakan hukum lingkungan dan jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
4. Kurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
5. Meningkatnya jumlah sampah organik dan anorganik masyarakat memerlukan sistem pengelolaan sampah menggunakan teknologi yang tepat;
6. Perubahan peraturan perundangan yang semakin dinamis.

2.8.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Adanya PPNS dan PPLHD untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan dan/atau usaha;

5. Adanya dukungan pembiayaan baik dari provinsi dan pusat;
6. Daya dukung dan daya tampung lingkungan belum terlampaui;
7. Adanya partisipasi kelompok swadaya masyarakat baik di desa maupun kota dalam mengatasi permasalahan sampah.

2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
 - b. Belum optimalnya akuntabilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. Belum optimalnya sumber daya yang memadai dan kompeten baik SDM maupun sarana dan prasarana.
2. Belum optimalnya komponen pendukung kualitas lingkungan hidup:
 - a. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3;
 - c. Belum optimalnya penanganan pengaduan;
 - d. Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup;
 - e. Belum optimalnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan;
 - f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Kurangnya pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak MHA terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah:
 - a. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah;
 - b. Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan persampahan yang responsif gender;
 - d. Belum ada Masterplan/ Rencana Induk Persampahan.
4. Kurangnya pengelolaan keanekaragaman hayati:
 - a. Kurangnya RTH publik;

- b. Kurangnya sarana prasarana publik dan ramah anak di Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

2.10. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis yaitu permasalahan, potensi, isu nasional, isu provinsi, isu yang ada dalam SDGs, isu dalam KLHS, maupun isu RPJMD pada periode sebelumnya.

Peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan peningkatan kegiatan masyarakat, berdampak pada peningkatan penggunaan sumber daya alam, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Sejalan dengan peningkatan penduduk, daya dukung pangan dan daya dukung air, dan kualitas lingkungan hidup diperkirakan menurun. Sementara emisi gas rumah kaca sebagai penyumbang utama perubahan iklim diperkirakan meningkat hingga lima tahun yang akan datang. Perubahan iklim dapat meningkatkan kejadian bencana, khususnya bencana yang terkait iklim. Tanpa upaya yang signifikan hal-hal tersebut akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk juga berpengaruh pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Limbah sampah yang dihasilkan berpotensi merusak kualitas air dan tanah, serta dapat menimbulkan bencana alam. Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga pemrosesan akhir.

Pada tingkat rumah tangga, masih terdapat ketimpangan peran dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan. Di banyak

masyarakat, perempuan masih memikul tanggung jawab utama dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga, tanpa diimbangi dengan dukungan infrastruktur maupun kebijakan yang memadai. Ketidaksetaraan ini mengakibatkan perempuan mengalami beban ganda, terutama di wilayah perkotaan padat dan kawasan dengan sistem pengelolaan sampah yang belum terorganisir.

Keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan program pengelolaan sampah masih minim. Kurangnya ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah seringkali tidak sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi spesifik gender. Sementara, pada tingkat pemrosesan akhir, perempuan seringkali tidak mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan, alat, atau skema pendanaan yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau ekonomi sirkular. Hal ini memperkuat ketimpangan ekonomi dan mempersempit peluang perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan tetap melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menopangnya, serta mempertimbangkan pengarusutamaan gender dalam setiap aktivitasnya.

Berikut merupakan perumusan isu strategis perangkat daerah dengan mendasarkan pada permasalahan, potensi dan lingkungan yang dinamis:

Permasalahan	Potensi	Isu KLHS	Isu Provinsi	Isu Nasional	Isu Global	Isu Strategis
Kualitas lingkungan hidup berpotensi menurun	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup belum terlampaui	Ancaman Degradasi Hutan dan Lahan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, <i>Urban Sprawl</i> , Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	Perubahan iklim	Kualitas lingkungan hidup

Sumber :<https://eplanning.banyumaskab.go.id>

Berdasarkan hasil perumusan isu strategis tersebut, dengan melihat permasalahan, potensi, dan berbagai isu baik isu KLHS, isu provinsi, isu nasional maupun isu global terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah **“Kualitas Lingkungan Hidup”**.

2.11. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

”Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

a. Produktif

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal, secara terus menerus dengan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Berdasarkan pengertian tersebut produktif mencakup pencapaian hasil/tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan. Dengan demikian daerah yang produktif dapat dimaknai sebagai daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah yang produktif menunjukkan performa

ekonomi yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

b. Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dihormati tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan terhadap orang yang lemah, dan pembuatan keputusan yang didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Pemerintahan daerah yang adil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.

c. Sejahtera

Sejahtera berarti kondisi yang baik dan makmur. Kata ini merujuk pada keadaan masyarakat hidup dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, sejahtera menggambarkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, ada kedamaian, dan setiap orang memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, Daerah yang sejahtera adalah daerah dimana warga masyarakat hidup dalam kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;

4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu misi 5 (lima) **“Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup”**.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 2 serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian dan Kualitas Pelayanan Publik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera Misi 5 : Meningkatkan Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah Sasaran 6 : Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Hidup	[Tujuan] Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	67	75,49	75,54	75,58	75,63	75,67	75,71
	[Sasaran] Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	55,14	71,78	71,88	71,98	72,08	72,18	72,28
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,58	85,77	85,78	85,79	85,80	85,81	85,82
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	47,46	62,87	62,88	62,89	62,90	62,91	62,92
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	66,77	70,32	74,19	78,28	82,57	87,06	89,37
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	75,62	77,05	78,51	80,48	83,51	87,19	91,06
	[Sasaran] Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,85	89,90	89,95	90	90,05	90,10	90,15
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,22 (cukup dg catatan)	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,549	3,55	3,551	3,552	3,553	3,554	3,555

3.2. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas RTH Publik;
3. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah;
4. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

3.3. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perencanaan lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak lingkungan;
2. Peningkatan pelayanan perizinan lingkungan dan pelaporan, serta penguatan sistem terhadap pemenuhan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL);
3. Fasilitasi identifikasi, verifikasi, dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan wilayah adat;
4. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
5. Peningkatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan RTH publik sebagai ruang interaksi sosial, edukasi, dan konservasi;
6. Pembangunan, optimalisasi dan peningkatan infrastruktur persampahan untuk memperluas cakupan area layanan persampahan;
7. Penguatan sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga TPA melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan melibatkan masyarakat;
8. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9. Peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha

dan/atau kegiatan;

10. Optimalisasi penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan;
11. Penyelesaian pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang responsif dan transparan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	1. Peningkatan perencanaan lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak lingkungan; 2. Peningkatan pelayanan perizinan lingkungan dan pelaporan, serta penguatan sistem terhadap pemenuhan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL); 3. Fasilitasi identifikasi, verifikasi, dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan wilayah adat; 4. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
		Meningkatkan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas RTH Publik	1. Peningkatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan RTH publik sebagai ruang interaksi sosial, edukasi, dan konservasi.
		Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penghapusan merkuri dan fasilitasi pemulihan lahan terkontaminasi B3 dan/atau limbah B3; 4. Optimalisasi penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan; 5. Penyelesaian pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang responsif dan transparan.
		Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah	1. Pembangunan, optimalisasi dan peningkatan infrastruktur persampahan untuk memperluas cakupan area layanan persampahan; 2. Penguatan sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga TPA melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan melibatkan masyarakat.

3.4. Penahapan Renstra

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Fokus penahapan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Pengembangan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menumbuhkan inovasi dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	Perwujudan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Perangkat Daerah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka perangkat daerah memegang peranan strategis melalui pelaksanaan program-program yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Program ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta sebagai upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Program yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 terbagi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Penunjang yang meliputi:

2.11.02 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan dan pemutakhiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta penguatan data dan informasi lingkungan berbasis sistem informasi geospasial. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dirancang untuk menekan berbagai sumber pencemaran, baik udara, air, maupun tanah, serta mengatasi kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Kegiatan program ini meliputi penegakan peraturan lingkungan, mendorong penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan, serta pengembangan sistem pengelolaan limbah yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pelaporan dan pengendalian

pencemaran juga menjadi fokus utama untuk memastikan keberhasilan program.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Program ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Kegiatan dalam program ini meliputi pendataan dan pemetaan potensi keanekaragaman hayati lokal, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pemeliharannya.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Program ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan dalam program ini meliputi identifikasi dan pemantauan bahan serta limbah B3 di berbagai sektor, pengawasan penerapan standar keselamatan dan prosedur pengelolaan B3, serta pemberian pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan atau menghasilkan B3.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup memperoleh izin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan dalam program ini meliputi verifikasi dokumen izin lingkungan, pemantauan pelaksanaan persyaratan izin, pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH
Program ini ditujukan untuk identifikasi dan pendataan keberadaan MHA, dokumentasi kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, serta penguatan kapasitas

masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Program ini juga mendorong integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan dan peraturan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), sehingga hak-hak masyarakat adat diakui dan terlindungi secara hukum.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Kegiatan dalam program ini meliputi penyelenggaraan seminar, workshop, pelatihan teknis pengelolaan lingkungan, kampanye sadar lingkungan, serta penyuluhan tentang konservasi sumber daya alam. Program ini juga mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan sekolah, komunitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta agar pesan-pesan lingkungan hidup dapat tersampaikan secara efektif dan berkelanjutan.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memberikan respons cepat, tepat, dan transparan terhadap laporan atau keluhan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayah daerah. Kegiatan dalam program ini meliputi penerimaan, verifikasi, dan investigasi pengaduan lingkungan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan masalah, serta pemantauan tindak lanjut hingga penyelesaian pengaduan.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan, antara lain edukasi dan sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), pengembangan sistem pengangkutan dan pengolahan akhir sampah, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung daur ulang dan pengolahan limbah. Selain itu,

program ini juga mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor informal, pelaku usaha, serta komunitas lokal dalam rantai pengelolaan sampah.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kegiatan dalam program ini meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan dan aset daerah, tata kelola kelembagaan, pengembangan SDM aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja, serta penguatan sistem informasi dan pelayanan administrasi. Program ini juga mencakup koordinasi internal antar bidang/unit kerja dan fasilitasi hubungan kerjasama antar instansi, baik vertikal maupun horizontal.

4.2. Kegiatan Perangkat Daerah

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya. Demi mewujudkan program strategis, Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai kegiatan yang terencana melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara terpadu. Berikut kegiatan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mendukung terlaksananya program-program strategis :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi proses identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap kondisi dan potensi lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tekanan-tekanan yang dihadapi wilayah terkait. Selain itu, RPPLH juga memuat arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, penetapan kawasan lindung dan kawasan

budidaya, serta strategi pelestarian sumber daya alam dan pengendalian pencemaran.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS) kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), atau kebijakan strategis lainnya. Prosesnya melibatkan identifikasi isu strategis lingkungan hidup, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang ramah lingkungan. KLHS juga wajib melibatkan partisipasi publik serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.

3. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup berbagai upaya, antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan prinsip ramah lingkungan dalam setiap aktivitas. Kegiatan ini juga didukung dengan koordinasi dengan instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut atas temuan pencemaran atau potensi kerusakan lingkungan.

4. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengawasan lingkungan serta hasil pemantauan kualitas lingkungan yang menunjukkan adanya penurunan kondisi lingkungan melebihi baku mutu atau daya dukung yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi keanekaragaman hayati lokal, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pemeliharaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta penguatan peran masyarakat dalam perlindungan flora dan fauna lokal.

6. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kegiatan ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3, termasuk penyimpanan sementara. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada pelaku usaha, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun sektor lain yang menghasilkan limbah B3 agar memahami kewajiban dan prosedur yang harus dipenuhi dalam penyimpanan limbah tersebut.

7. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan limbah B3, baik terhadap pengelola fasilitas maupun terhadap penghasil limbah. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha kecil, fasilitas kesehatan, sekolah, dan instansi lain agar tidak membuang limbah B3 sembarangan dan memahami pentingnya penanganan limbah yang ramah lingkungan.

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pemantauan lingkungan, pelaporan berkala, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui (seperti UKL-UPL atau SPPL) dan izin yang telah diterbitkan, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Kegiatan ini meliputi pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan teknis kepada MHA untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

perkembangan regulasi dan teknologi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA atas wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka kelola, termasuk dalam konteks tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan.

10. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan mencakup materi tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti workshop, seminar, lokakarya, dan kegiatan lapangan yang melibatkan anggota lembaga kemasyarakatan secara langsung.

11. Kegiatan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini meliputi penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran, kerusakan lingkungan, pelanggaran izin lingkungan, serta praktik usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Selanjutnya, pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan masalah secara cepat dan tepat.

12. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi volume dan dampak negatif sampah melalui seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah secara terencana dan terpadu sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan dengan membangun dan mengelola fasilitas pengolahan sampah terpadu, tempat pembuangan akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis dan lingkungan, serta mengembangkan program-program edukasi dan

kampanye sadar sampah. Selain itu, pemerintah daerah mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti bank sampah dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berfokus pada penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan penetapan alokasi sumber daya keuangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur pencapaian hasil dan dampak dari pelaksanaan program serta ketaatan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.

14. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertanggung jawab menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan yang telah direncanakan, memastikan proses penganggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan kas, pembukuan transaksi keuangan, serta verifikasi dan pembayaran dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pelaporan keuangan disusun secara berkala dan diajukan kepada pimpinan daerah serta instansi pengawas untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan.

15. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup pengelolaan tata usaha, pengarsipan, pelayanan surat menyurat, koordinasi internal, pengelolaan sarana dan prasarana kantor, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, administrasi umum mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan dokumentasi dan laporan yang tepat waktu serta memfasilitasi koordinasi antar bagian agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mencakup pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan barang milik daerah secara terorganisir dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini meliputi inventarisasi berkala untuk mengevaluasi kondisi dan kebutuhan pemeliharaan barang, serta pengamanan yang memadai untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset. Apabila barang sudah tidak layak pakai atau tidak diperlukan lagi, dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

17. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup berbagai bidang dan meliputi penyediaan tenaga ahli, peralatan, transportasi, komunikasi, serta dukungan logistik lainnya sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Selain itu, penyediaan jasa penunjang juga mencakup pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung, koordinasi antarunit kerja, serta pengembangan sistem kerja yang mendukung produktivitas dan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa jasa penunjang diberikan dengan standar kualitas yang baik, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan, pembersihan, perbaikan ringan hingga sedang, pengecekan teknis, penggantian komponen jika diperlukan, serta pelaporan secara berkala kepada pengelola barang dalam sistem inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.3. Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan, sebagai bagian dari upaya perangkat daerah dalam mendukung

pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sub kegiatan ini juga merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, baik dari aspek perencanaan, operasional, hingga evaluasi dan pelaporannya. Rencana Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini mencakup aktivitas penyusunan rencana kerja pengendalian pelaksanaan RPPLH, pengumpulan dan analisis data pelaksanaan RPPLH, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, koordinasi dengan OPD dan pihak terkait, penyusunan laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH, dan penyempurnaan dokumen RPPLH berdasarkan hasil pengendalian.

2. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup KLHS, pengumpulan dan analisis data awal, konsultasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan, penyusunan dan validasi dokumen KLHS Rencana Tata Ruang, serta penyampaian dan pengesahan dokumen KLHS Rencana Tata Ruang.

3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD

Sub kegiatan ini diarahkan pada pengumpulan dan analisis data awal, konsultasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan, penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD, monitoring dan evaluasi KLHS RPJPD/RPJMD, serta pelaporan pelaksanaan dan evaluasi KLHS RPJPD/RPJMD.

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas pembinaan dan sosialisasi lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, dengan melibatkan koordinasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam

menyusun kebijakan dan langkah teknis pencegahan pencemaran.

5. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas identifikasi sumber emisi dan serapan GRK, sosialisasi dan konsultasi publik, analisis tren dan proyeksi emisi GRK, serta dokumen profil emisi GRK daerah.

6. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

7. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pengelolaan laboratorium meliputi aktivitas pemeliharaan alat dan sarana laboratorium, pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengembangan prosedur kerja dan standar operasional yang sesuai dengan acuan nasional maupun internasional, serta melakukan pengujian sampel secara rutin maupun insidental yang berasal dari berbagai kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan di wilayah Kabupaten/Kota.

8. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas pemantauan berkala terhadap kondisi lingkungan, penyampaian informasi peringatan, pemberitahuan langsung langsung kepada komunitas rentan, serta lintas sektor untuk penanganan dan mitigasi.

9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se Kabupaten Banyumas dan taman keanekaragaman hayati, serta kegiatan penghijauan/penanaman pohon.

11. Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas sosialisasi regulasi dan kewajiban pengelolaan limbah B3, pendampingan penyusunan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3, integrasi data dengan SIMPEL.

12. Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas sosialisasi peraturan perundang-undangan limbah B3, pendampingan pemenuhan syarat teknis penyimpanan sementara, kunjungan lapangan ke penghasil/pengumpul limbah B3, serta penyusunan laporan hasil pembinaan.

13. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau izin PPLH

14. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

15. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

16. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas pelatihan teknis dan manajemen kegiatan lingkungan khususnya kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas, melalui kegiatan Adiwiyata dengan pemberian dukungan teknis dan sarana prasarana pendukung.

17. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas sosialisasi dan edukasi kepada lembaga pendidikan atau masyarakat, kampanye edukasi publik tentang perilaku ramah lingkungan, lomba dan penghargaan kepada Saka Kalpataru atau sekolah berprestasi dalam pelestarian lingkungan

18. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat

Sub kegiatan ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas kader lingkungan/kesehatan khususnya di tingkat PKK, edukasi dan sosialisasi kepada keluarga, gerakan keluarga sadar lingkungan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.

19. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas penerimaan dan registrasi pengaduan, survei lapangan, koordinasi internal antar bidang/OPD terkait, tindak lanjut pengaduan dan penyusunan berita acara hasil verifikasi/pemeriksaan lapangan, penyelesaian, pelaporan dan dokumentasi.

20. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas sosialisasi kebijakan dan regulasi persampahan, kampanye pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya, pelatihan kader lingkungan dan komunitas pengelola sampah, serta peningkatan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah.

21. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas pemetaan peraturan, program, dan kelembagaan yang sudah ada, kajian dan penyusunan dokumen teknis, pelibatan pemangku kepentingan

(*stakeholder engagement*), serta evaluasi dan review berkala.

22. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas rutin sarana penanganan sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, manajemen operasional dan sdm, pengadaan bahan dan suku cadang, serta pengawasan dan monitoring operasional.

23. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas fasilitasi pemilahan di TPS dan TPS3R, peningkatan kapasitas petugas/operator pemilah sampah, pengoperasian pusat pengomposan (komposting) skala TPS3R, TPST, atau PDU, pengiriman hasil pilahan ke mitra daur ulang, penyusunan SOP pengolahan di masing-masing jenis instalasi, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja pengolahan.

24. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas pendataan jumlah timbulan sampah yang berhasil dikurangi, pelaporan hasil kegiatan pembatasan timbulan sampah, serta evaluasi efektivitas kampanye dan intervensi pembatasan.

25. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Sub kegiatan ini diarahkan pada aktivitas pendataan volume sampah yang didaur ulang per jenis (organik, plastik, kertas, logam), pelaporan kontribusi daur ulang terhadap pengurangan timbulan sampah kabupaten/kota, serta membangun kemitraan dengan lsm, perguruan tinggi, dan swasta dalam pengembangan teknologi daur ulang.

26. Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengumpulan data dan

informasi sektoral, penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, Dokumen Pengelolaan Risiko), serta rapat koordinasi lintas bidang internal OPD.

27. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengumpulan data kinerja, analisis dan verifikasi data, penyusunan laporan evaluasi kinerja, tindak lanjut dan perbaikan kinerja, serta penyampaian dan sosialisasi hasil evaluasi.

28. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengelolaan data kepegawaian dan penggajian, proses penyusunan daftar gaji dan tunjangan, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan, pelaporan dan dokumentasi.

29. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengelolaan data dan dokumen kepegawaian, penyusunan dan pengelolaan surat menyurat dan instrumen administrasi, pengelolaan absensi dan kehadiran asn, pelayanan administrasi tugas dan kegiatan asn, pelaporan dan dokumentasi.

30. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas perencanaan, pengadaan, pemasangan, serta pelaporan dan dokumentasi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

31. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas perencanaan, pengadaan, serta pelaporan dan dokumentasi komponen peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, bahan computer, benda pos, kertas dan cover, dll).

32. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas perencanaan, pengadaan, serta pelaporan dan dokumentasi rumah tangga (sapu, cikrak, gas, alat dan bahan pembersih, dll).

33. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas perencanaan, pengadaan, serta pelaporan dan dokumentasi bahan logistik kantor (makan minum harian pegawai, makan minum rapat, bahan bakar minyak, dll).

34. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas perencanaan dan persiapan rapat, pemasangan, serta pelaporan dan dokumentasi barang cetak dan penggandaan.

35. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas perencanaan, pelaksanaan rapat, serta pelaporan dan dokumentasi rapat.

36. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengelolaan arsip masuk dan arsip keluar, klasifikasi dan kodefikasi arsip, penyimpanan arsip dinamis, pengadaan dan pembangunan gedung arsip, pemeliharaan dan pengawasan arsip, pelaporan dan evaluasi.

37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengadaan dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta pelaporan dan dokumentasi.

38. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengadaan dan penyediaan jasa pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah, serta pelaporan dan dokumentasi.

39. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengadaan dan penyediaan barang mebel, serta pelaporan dan dokumentasi.

40. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengadaan dan penyediaan peralatan dan mesin lainnya (computer, printer, AC, dll), serta pelaporan dan dokumentasi.

41. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan, serta pelaporan dan dokumentasi.

42. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pemeliharaan kendaraan, pengelolaan pajak dan perizinan kendaraan, serta pelaporan dan dokumentasi.

43. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pemeliharaan peralatan dan mesin, serta pelaporan dan dokumentasi.

44. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, serta pelaporan dan dokumentasi.

45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini berfokus pada aktivitas pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya, serta pelaporan dan dokumentasi.

4.4. Sub Kegiatan Prioritas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pembanguna daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dalam mendukung Program Trilas Bupati Banyumas, Program Dukungan Gubernur dan Program Strategis Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menetapkan 4 program prioritas dengan sub kegiatan dibawahnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Keterangan
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Misi 5 : Meningkatkan Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah Sasaran 6 : Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Hidup
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Optimalnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya kinerja pegelolaan sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	

Target kinerja serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dari Tujuan s.d. Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
ANGGARAN TOTAL								50.878. 274.611		63.203. 008.000		61.987. 600.000		63.827. 600.000		65.594. 000.000		66.559. 400.000
								36.713. 108.636		48.193. 119.513		46.673. 017.000		48.076. 549.000		49.423. 971.000		50.176. 152.542
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota		Progres Positif	Perhitungan IKLH Kabupaten/Ko ta yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	67	75,49		75,54		75,58		75,63		75,67		75,71	
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)		Progres Positif	Nilai IKA	55,14	71,78		71,88		71,98		72,08		72,18		72,28	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		Progres Positif	Nilai IKU	88,58	85,77		85,78		85,79		85,8		85,81		85,82	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Progres Positif	Nilai IKL	47,46	62,87		62,88		62,89		62,9		62,91		62,92	
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		Progres Positif	Nilai IKPS	66,77	70,32		74,19		78,28		82,57		87,06		89,37	
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		Progres Positif	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) =	75,62	77,05		78,51		80,48		83,51		87,19		91,06	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					<i>[(Jumlah Pendauran Ulang Sampah (data IIc) + Pengolahan (data IIIf)) / Timbulan Sampah (data II)] x 100</i>													
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terjamin kualitasnya	%	Progres Positif	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, kejelasan informasi dan data yang lengkap dibagi dengan jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup dikali 100%	100%	100%	329.451. 000	100%	1.646.20 2.000	100%	1.679.60 0.000	100%	1.727.40 0.000	100%	1.773.30 0.000	100%	1.795.80 0.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dokum en	Progres Positif	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan	3	3	149.871. 000	4	1.310.66 2.000	3	1.260.20 0.000	3	1.295.55 0.000	2	886.650. 000	3	1.346.85 0.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					lingkungan hidup													
2.11.02.2.01. 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokum en	Progres Positif		3	3	149.871. 000	4	1.310.66 2.000	3	1.260.20 0.000	3	1.295.55 0.000	2	886.650. 000	3	1.346.85 0.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun	Dokum en	Progres Positif	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun	1	1	179.580. 000	1	335.540. 000	1	419.400. 000	1	431.850. 000	2	886.650. 000	1	448.950. 000
2.11.02.2.02. 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokum en	Progres Positif		-	-	0	-	0	-	0	-	0	1	443.325. 000	-	0
2.11.02.2.02. 0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokum en	Progres Positif		1	1	179.580. 000	1	335.540. 000	1	419.400. 000	1	431.850. 000	1	443.325. 000	1	448.950. 000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	Progres Positif	Jumlah titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu dibagi total jumlah titik pantau kualitas air x 100%	32,86 %	32,86 %	99.178.7 00	32,86 %	580.722. 000	32,86 %	592.500. 000	32,86 %	609.300. 000	32,86 %	625.500. 000	32,86 %	633.400. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	Progres Positif	Jumlah titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu dibagi total jumlah titik pantau kualitas udara x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu	Titik	Progres Positif	Jumlah titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu	-	-	59.178.7 00	23	423.614. 000	23	432.203. 000	23	444.451. 000	23	456.267. 000	23	462.035. 000
		Jumlah titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Titik	Progres Positif	Jumlah titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	-	-		4		4		4		4		4	
		Persentase komunitas iklim yang mendapatkan sertifikat	%	Progres Positif	Persentase komunitas iklim yang mendapatkan sertifikat dibagi target komunitas iklim yang mendapatkan sertifikat x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.03.2.01. 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Dokum en	Progres Positif		1	1	5.763.40 0	2	38.450.0 00	2	39.230.0 00	2	40.320.0 00	2	41.390.0 00	2	41.911.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<i>pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan</i>																
2.11.03.2.01. 0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	<i>Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK</i>	<i>Dokum en</i>	<i>Progres Positif</i>		1	1	13.205.3 00	1	107.108. 000	1	109.281. 000	1	112.384. 000	1	115.370. 000	1	116.844. 000
2.11.03.2.01. 0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	<i>Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</i>	<i>Laporan</i>	<i>Progres Positif</i>		-	-	0	1	172.212. 000	1	175.700. 000	1	180.689. 000	1	185.495. 000	1	187.832. 000
2.11.03.2.01. 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	<i>Dokum en</i>	<i>Progres Positif</i>		60	101	40.210.0 00	101	105.844. 000	101	107.992. 000	101	111.058. 000	101	114.012. 000	101	115.448. 000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kecamatan yang dilakukan penilaian kerusakan lahan untuk produksi Bomassa	Lokasi	Progres Positif	Jumlah lokasi kecamatan yang dilakukan penilaian kerusakan lahan untuk	1	1	40.000.0 00	1	157.108. 000	1	160.297. 000	1	164.849. 000	1	169.233. 000	1	171.365. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					produksi Bomassa													
2.11.03.2.02. 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	Laporan	Progres Positif		1	1	40.000.0 00	1	157.108. 000	1	160.297. 000	1	164.849. 000	1	169.233. 000	1	171.365. 000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH Publik terhadap Kawasan Perkotaan	%	Progres Positif	Persentase Luasan RTH Publik / Luas Kawasan Perkotaan x 100%	2,27%	2,28%	2.834.86 1.375	2,29%	10.438.6 60.000	2,30%	10.650.5 00.000	2,31%	10.954.0 00.000	2,32%	11.245.3 00.000	2,33%	11.388.1 00.000
		Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor FOLU	TonCO 2eq	Progres Positif	Jumlah penurunan emisi GRK kumulatif sektor FOLU	1.320, 800	218.7 38,82 0		261.9 28,36 0		303.1 84,49 0		342.3 76,53 0		379.3 42,21 0		413.8 82,52 0	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase penambahan luasan RTH publik	%	Progres Positif	Luas RTH tahun n - luas RTH tahun (n-1) x 100%	2,66%	0,20%	2.834.86 1.375	0,20%	10.438.6 60.000	0,20%	10.650.5 00.000	0,20%	10.954.0 00.000	0,20%	11.245.3 00.000	0,20%	11.388.1 00.000
2.11.04.2.01. 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Ha	Progres Positif		386.32	388.0 6	2.097.51 4.875	389.7 6	8.538.00 0.000	391.4 6	8.711.31 0.000	393.1 6	8.959.58 6.435	394.8 6	9.197.11 2.394	396.5 6	9.313.90 7.912

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.04.2.01. 0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	Progres Positif		63	64	737.346. 500	65	1.600.66 0.000	66	1.633.10 0.000	67	1.679.60 0.000	68	1.725.00 0.000	69	1.746.90 0.000
2.11.04.2.01. 0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	Progres Positif		-	-	0	1	300.000. 000	1	306.090. 000	1	314.813. 565	1	323.187. 606	1	327.292. 088
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	Progres Positif	Jumlah limbah B3 yang dikelola dibagi jumlah limbah B3 yang dihasilkan dibagi 100%	100%	100%	30.952.0 20	100%	321.324. 000	100%	327.800. 000	100%	337.100. 000	100%	346.000. 000	100%	350.300. 000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Pelaku Usaha	Kumulati f	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	101	120	23.612.0 20	140	110.662. 000	160	112.897. 000	180	116.100. 000	200	119.165. 000	220	120.642. 000
2.11.05.2.01. 0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan	Dokum en	Progres Positif		-	20	23.612.0 20	20	110.662. 000	20	112.897. 000	20	116.100. 000	20	119.165. 000	20	120.642. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	<i>melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission)</i>																
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3	Kegiata n	Progres Positif	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3	1	1	7.340.00 0	2	210.662. 000	2	214.903. 000	2	221.000. 000	2	226.835. 000	2	229.658. 000
2.11.05.2.02. 0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	<i>Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina</i>	<i>Usaha</i>			-	-	7.340.00 0	75	210.662. 000	75	214.903. 000	75	221.000. 000	75	226.835. 000	75	229.658. 000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	Progres Negatif	Jumlah penanggungja wab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	30%	30%	41.549.7 42	28%	421.324. 000	28%	429.800. 000	27%	442.000. 000	27%	453.700. 000	26%	459.400. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kot a dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%													
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Pelaku Usaha	Progres Positif	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	39	39	41.549.742	39	421.324.000	39	429.800.000	39	442.000.000	39	453.700.000	39	459.400.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	Progres Positif		68	68	21.110.000	68	264.216.000	68	269.535.000	68	277.000.000	68	284.350.000	68	287.930.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	Progres Positif		39	39	20.439.742	39	157.108.000	39	160.265.000	39	165.000.000	39	169.350.000	39	171.470.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Kelompok Masyarakat Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	Progres Positif	Jumlah MHA yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah rencana MHA yang ditingkatkan kapasitasnya dikali 100%	100%	100%	8.807.00 0	100%	160.662. 000	100%	163.900. 000	100%	168.500. 000	100%	172.900. 000	100%	175.000. 000
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok Masyarakat Adat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	Kelomp ok	Progres Positif	Jumlah Kelompok Masyarakat Adat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	1	1	8.807.00 0	1	160.662. 000	1	163.900. 000	1	168.500. 000	1	172.900. 000	1	175.000. 000
2.11.07.2.02. 0001	Pemberdayaan, Kemitraan,	Jumlah Dokumen Kelembagaan	Dokum en	Progres Positif		1	1	8.807.00 0	1	160.662. 000	1	163.900. 000	1	168.500. 000	1	172.900. 000	1	175.000. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan																
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kader lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	%	Progres Positif	Jumlah kader lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi rencana jumlah kader lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya dikali 100%	-	100%	262.901. 100	100%	374.878. 000	100%	382.400. 000	100%	393.200. 000	100%	403.600. 000	100%	408.700. 000
		Persentase jumlah sekolah adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPLHS)	%	Progres Positif	Jumlah sekolah yang melaksanakan GPBLHS dibagi total jumlah sekolah dikali 100%	-	34%		35%		36%		37%		38%		39%	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Jumlah kader lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Progres Positif	Jumlah kader lingkungan hidup yang	88	50	262.901. 100	100	374.878. 000	100	382.400. 000	100	393.200. 000	100	403.600. 000	100	408.700. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				ditingkatkan kapasitasnya													
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)	Sekolah	Progres Positif	Jumlah sekolah Adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)	455	469		483		496		510		524		538	
2.11.08.2.01. 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	<i>Dokum en</i>	<i>Progres Positif</i>		1	1	240.000. 000	1	210.662. 000	1	214.885. 000	1	220.000. 000	1	225.808. 000	1	228.655. 000
2.11.08.2.01. 0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat</i>	<i>Keluarg a</i>	<i>Progres Positif</i>		-	50	10.757.5 00	100	57.108.0 00	100	58.255.0 00	100	59.000.0 00	100	60.557.0 00	100	61.320.0 00
2.11.08.2.01. 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelomp</i>	<i>Lembag a</i>	<i>Progres Positif</i>		3 Lembag a	2 Lemb aga	12.143.6 00	2 Lemb aga	107.108. 000	2 lemba ga	109.260. 000	2 lemba ga	114.200. 000	2 lemba ga	117.235. 000	2 lemba ga	118.725. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat	ok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH																
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	Progres Positif	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100%	100%	46.887.9 00	100%	160.662. 000	100%	163.900. 000	100%	168.500. 000	100%	172.900. 000	100%	175.000. 000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	Laporan	Progres Positif	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	37	15	46.887.9 00	15	160.662. 000	15	163.900. 000	15	168.500. 000	15	172.900. 000	15	175.000. 000
2.11.10.2.01. 0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dik elola	Pengad uan	Progres Positif		37	15	46.887.9 00	15	160.662. 000	15	163.900. 000	15	168.500. 000	15	172.900. 000	15	175.000. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	Progres Positif	Jumlah sampah yang terkelola dibagi jumlah timbulan sampah x 100%	76,24 %	80,99 %	10.957.7 20.225	85,74 %	9.871.06 5.000	90,50 %	7.573.40 0.000	95%	7.863.20 0.000	100%	8.141.50 0.000	100%	8.377.80 0.000
		Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor persampahan	TonCO 2eq	Progres Positif	Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor persampahan	37.698	163.9 83		210.9 25		262.6 46		319.6 25		382.4 00		451.5 74	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	%	Progres Positif	Jumlah pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah	48,10	50,48	10.957.7 20.225	52,85	9.871.06 5.000	55,23	7.573.40 0.000	57,6	7.863.20 0.000	59,98	8.141.50 0.000	59,98	8.377.80 0.000
		Persentase penanganan sampah	%	Progres Positif	Jumlah penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%	28,14	30,52		32,89		35,27		37,64		40,02		40,02	
2.11.11.2.01. 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelomp ok	Progres Positif		127	128	121.800. 000	128	597.451. 000	128	609.579. 000	128	626.950. 000	128	643.626. 000	128	651.800. 000
2.11.11.2.01. 0008	Penyusunan Rencana,	Jumlah dokumen kebijakan dan	Dokum en	Progres Positif		3	1	306.421. 250	1	91.400.0 00	1	150.000. 000	1	154.275. 000	1	158.378. 715	1	160.390. 125

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	<i>strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>																
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>	Unit	Progres Positif		5	5	2.963.005.000	5	330.000.000	5	336.699.000	5	346.294.000	5	355.503.000	5	360.017.000
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	<i>Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>	Unit	Progres Positif		-	-	0	112	2.020.425.000	112	2.061.439.000	112	2.120.190.000	112	2.176.587.000	112	2.204.220.000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan	<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank</i>	Ton	Progres Positif		75125,83	82367,88	8.940.000	89731,6	663.500.000	97273,65	676.969.000	104941,57	696.200.000	112793,28	714.718.000	114022,73	723.740.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																
2.11.11.2.01. 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	Progres Positif		-	-	0	2	433.750. 000	2	442.555. 000	2	455.120. 000	2	467.226. 000	2	473.150. 000
2.11.11.2.01. 0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	Progres Positif		12679 6,59	13060 0,49	35.133.0 00	13451 8,5	461.000. 000	13989 9,24	470.358. 000	14829 3,2	483.790. 000	15867 3,72	496.658. 000	16978 0,88	502.960. 000
2.11.11.2.01. 0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Progres Positif		5	5	7.522.42 0.975	5	5.273.53 9.000	5	2.825.80 1.000	5	2.980.38 1.000	5	3.128.80 3.285	5	3.301.52 2.875
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai SAKIP perangkat daerah	89,85	89,9		89,95		90		90,05		90,1		90,15	
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,22 (cuku p dg catata n)	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah			Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,549	3,55		3,551		3,552		3,553		3,554		3,555	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	22.100.7 99.574	100%	24.217.6 20.513	100%	24.709.2 17.000	100%	25.413.3 49.000	100%	26.089.2 71.000	100%	26.412.6 52.542
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	49	49		49		50		50		50		50	
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62	75		78		79		80		81		82	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	Progres Positif	Jumlah Program yang ada di dokumen Renja : Jumlah Program yang ada di Renstra x 100%	100%	100%	18.557.3 75	100%	254.441. 449	100%	259.594. 000	100%	266.922. 000	100%	274.015. 000	100%	277.494. 000
		Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	Progres Positif	(Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdapat dalam DPA / Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	Kumulati f		5	5	9.415.87 5	5	147.333. 449	5	150.312. 000	5	154.500. 000	5	158.605. 000	5	160.619. 000
2.11.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kumulati f		6	6	9.141.50 0	6	107.108. 000	6	109.282. 000	6	112.422. 000	6	115.410. 000	6	116.875. 000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	17.201.6 82.340	100%	15.420.2 95.000	100%	15.733.3 26.000	100%	16.181.7 25.000	100%	16.612.1 60.000	100%	16.823.1 33.000
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
2.11.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Progres Positif		155 Orang	140 Orang	17.038.3 57.340	125	15.206.2 15.000	190	15.514.9 01.000	190	15.957.0 75.000	190	16.381.5 35.000	190	16.589.5 80.000
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	Kumulati f		4	4	163.325. 000	4	214.080. 000	4	218.425. 000	4	224.650. 000	4	230.625. 000	4	233.553. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	700%	100%	388.805. 625	100%	1.686.98 7.000	100%	1.721.23 0.000	100%	1.770.28 1.000	100%	1.817.40 7.000	100%	1.839.98 9.000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	1	2.494.00 0	2	80.331.0 00	2	81.961.0 00	2	84.296.0 00	2	86.530.0 00	2	87.628.0 00
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	75.706.8 42	4	107.108. 000	4	109.282. 000	4	112.396. 000	4	115.385. 000	4	116.850. 000
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	4	7.431.00 0	4	107.108. 000	4	109.282. 000	4	112.396. 000	4	115.385. 000	4	116.850. 000
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	131.610. 000	12	374.878. 000	12	382.488. 000	12	393.388. 000	12	403.900. 000	12	409.039. 000
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak	Paket	Kumulati f		2	4	26.440.0 00	4	107.108. 000	4	109.282. 000	4	112.396. 000	4	115.385. 000	4	116.850. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan																
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		70	50	145.123. 783	75	696.238. 000	75	710.371. 000	75	730.616. 000	75	750.050. 000	75	760.070. 000
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		1	-	0	3	214.216. 000	4	218.564. 000	4	224.793. 000	4	230.772. 000	4	232.702. 000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	82.020.3 00	100%	696.113. 000	100%	710.242. 000	100%	730.483. 000	100%	749.912. 000	100%	758.946. 000
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	38%	25%		35%		35%		35%		35%		35%	
2.11.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	2	13.000.0 00	15	214.127. 000	15	218.473. 000	15	224.699. 000	15	230.675. 000	15	233.116. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		1	5	46.520.3 00	10	267.770. 000	10	273.205. 000	10	280.991. 000	10	288.465. 000	10	292.128. 000
2.11.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	3	22.500.0 00	5	214.216. 000	5	218.564. 000	5	224.793. 000	5	230.772. 000	5	233.702. 000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.917.21 4.734	100%	4.080.29 0.400	100%	4.163.11 9.000	100%	4.281.76 7.000	100%	4.395.66 3.000	100%	4.451.48 7.000
2.11.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulati f		12	12	395.851. 750	12	824.280. 000	12	841.012. 000	12	864.980. 000	12	887.990. 000	12	899.267. 000
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulati f		12	12	2.521.36 2.984	12	3.256.01 0.400	12	3.322.10 7.000	12	3.416.78 7.000	12	3.507.67 3.000	12	3.552.22 0.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pemeliharaan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase	100%	100%	1.492.51 9.200	100%	2.079.49 3.664	100%	2.121.70 6.000	100%	2.182.17 1.000	100%	2.240.11 4.000	100%	2.261.60 3.542

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah			capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	57%	57%		60%		60%		60%		60%		60%	
2.11.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulati f		140	210	1.379.00 0.000	250	1.437.55 3.664	250	1.466.73 6.000	250	1.508.53 7.000	250	1.548.66 4.000	250	1.561.37 3.542
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulati f		12	44	42.520.0 00	50	160.662. 000	50	163.923. 000	50	168.594. 000	50	173.078. 000	50	175.276. 000
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	2	43.999.2 00	3	374.878. 000	4	382.488. 000	4	393.388. 000	4	403.852. 000	4	408.980. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	4	27.000.0 00	4	106.400. 000	5	108.559. 000	5	111.652. 000	5	114.520. 000	5	115.974. 000
UPKP Wilayah Ajibarang																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	846.521. 500	100%	948.464. 000	100%	967.717. 000	100%	995.297. 000	100%	1.021.77 2.000	100%	1.034.74 9.000
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya	49	49		49		50		50		50		50	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					organisasi dan nilai-nilai integritas													
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62	75		78		79		80		81		82	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.200.00 0	100%	7.200.00 0	100%	7.345.00 0	100%	7.555.00 0	100%	7.755.00 0	100%	7.855.00 0
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu /	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		pengajuan anggaran (NPD)			jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%													
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Dokum en</i>	<i>Kumulati f</i>		4	4	7.200.00 0	4	7.200.00 0	4	7.345.00 0	4	7.555.00 0	4	7.755.00 0	4	7.855.00 0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	113.539. 500	100%	149.264. 000	100%	155.499. 000	100%	159.933. 000	100%	164.193. 000	100%	166.280. 000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>Kumulati f</i>		1	2	1.426.00 0	2	1.567.00 0	2	1.598.00 0	2	1.650.00 0	2	1.703.00 0	2	1.730.00 0
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>Kumulati f</i>		2	2	1.412.00 0	4	13.098.5 00	4	13.364.0 00	4	13.744.0 00	4	14.109.0 00	4	14.288.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	26.496.0 00	4	27.629.0 00	4	28.189.0 00	4	28.992.0 00	4	29.763.0 00	4	30.140.0 00
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	83.125.5 00	12	101.419. 500	12	103.182. 000	12	106.122. 000	12	108.944. 000	12	110.327. 000
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		1	1	180.000	2	1.050.00 0	2	1.075.00 0	2	1.105.00 0	2	1.134.00 0	2	1.148.00 0
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		15	8	900.000	20	4.500.00 0	20	4.591.00 0	20	4.721.00 0	20	4.846.00 0	20	4.907.00 0
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.694.00 0	2	3.740.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	6.000.00 0	100%	14.300.0 00	100%	12.389.0 00	100%	12.741.0 00	100%	13.078.0 00	100%	13.243.0 00
		Persentase kesesuaian	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi	28%	28%		35%		35%		35%		35%		35%	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)			pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%													
2.11.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>Kumulati f</i>		-	-	0	2	4.500.00 0	2	3.591.00 0	2	3.693.00 0	2	3.791.00 0	2	3.839.00 0
2.11.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>Kumulati f</i>		-	2	6.000.00 0	3	6.800.00 0	3	5.738.00 0	3	5.901.00 0	3	6.057.00 0	3	6.133.00 0
2.11.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>Kumulati f</i>		1	-	0	3	3.000.00 0	3	3.060.00 0	3	3.147.00 0	3	3.230.00 0	3	3.271.00 0
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	674.160. 000	100%	743.220. 000	100%	758.306. 000	100%	779.917. 000	100%	800.662. 000	100%	810.830. 000
2.11.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	7.260.00 0	12	7.920.00 0	12	8.080.00 0	12	8.310.00 0	12	8.531.00 0	12	8.639.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>																
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulatif</i>		12	12	666.900.000	12	735.300.000	12	750.226.000	12	771.607.000	12	792.131.000	12	802.191.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	45.622.000	100%	34.480.000	100%	34.178.000	100%	35.151.000	100%	36.084.000	100%	36.541.000
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	52%	52%		53%		54%		55%		56%		57%	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Unit</i>	<i>Kumulatif</i>		1	2	4.100.000	4	4.100.000	4	4.183.000	4	4.302.000	4	4.416.000	4	4.472.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulati f		3	3	6.505.00 0	3	7.980.00 0	3	7.141.00 0	3	7.344.00 0	3	7.539.00 0	3	7.634.00 0
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	1	35.017.0 00	1	20.400.0 00	1	20.814.0 00	1	21.407.0 00	1	21.976.0 00	1	22.255.0 00
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	2	2.000.00 0	2	2.040.00 0	2	2.098.00 0	2	2.153.00 0	2	2.180.00 0
UPKP Wilayah Banyumas																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	692.541. 500	100%	844.030. 000	100%	861.163. 000	100%	885.706. 000	100%	909.266. 000	100%	928.672. 457
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan,	49	49		49		50		50		50			

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas													
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62			78		79		80		81		82	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan	100%	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.345.000	100%	7.555.000	100%	7.755.000	100%	7.855.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					administrasi keuangan Perangkat Daerah													
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Dokum en</i>	<i>Kumulati f</i>		4	4	7.200.00 0	4	7.200.00 0	4	7.345.00 0	4	7.555.00 0	4	7.755.00 0	4	7.855.00 0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	102.456. 500	100%	147.100. 000	100%	152.584. 000	100%	156.935. 000	100%	161.116. 000	100%	163.165. 000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga</i>	<i>Paket</i>	<i>Kumulati f</i>		1	2	192.000	2	1.110.00 0	2	1.132.00 0	2	1.164.00 0	2	1.194.00 0	2	1.209.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	n Bangunan Kantor	n Bangunan Kantor yang Disediakan																
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	7.001.50 0	4	17.284.0 00	4	17.634.0 00	4	18.140.0 00	4	18.622.0 00	4	18.865.0 00
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	4	9.562.00 0	4	23.240.0 00	4	23.711.0 00	4	24.386.0 00	4	25.034.0 00	4	25.351.0 00
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	85.446.0 00	12	100.516. 000	12	101.556. 000	12	104.450. 000	12	107.228. 000	12	108.589. 000
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	255.000	2	450.000	2	460.000	2	475.000	2	498.000	2	504.000
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		15	-	0	15	4.500.00 0	15	4.591.00 0	15	4.721.00 0	15	4.846.00 0	15	4.907.00 0
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.694.00 0	2	3.740.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan	100%	100%	18.360.0 00	100%	10.000.0 00	100%	10.201.0 00	100%	10.490.0 00	100%	10.767.0 00	100%	10.902.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pemerintah Daerah				barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	100%	75%		75%		75%		75%		75%		75%	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif		-	-	0	2	1.500.000	2	1.530.000	2	1.573.000	2	1.614.000	2	1.634.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif		1	1	6.800.000	1	2.000.000	1	2.040.000	1	2.098.000	1	2.153.000	1	2.180.000
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif		1	3	11.560.000	3	6.500.000	3	6.631.000	3	6.819.000	3	7.000.000	3	7.088.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan	100%	100%	564.525.000	100%	604.800.000	100%	617.584.000	100%	635.185.000	100%	652.080.000	100%	668.219.457

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitungan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Pemerintah Daerah			penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif		-	-	0	-	7.260.000	-	7.405.200	-	7.553.304	-	7.704.370	-	7.858.457
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif		12	12	564.525.000	12	597.540.000	12	610.178.800	12	627.631.696	12	644.375.630	12	660.361.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	0	100%	74.930.000	100%	73.449.000	100%	75.541.000	100%	77.548.000	100%	78.531.000
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	52%	55%		55%		55%		55%		55%		55%	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulati f		-	-	0	2	11.950.0 00	2	12.192.0 00	2	12.539.0 00	2	12.872.0 00	2	13.035.0 00
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulati f		5	-	0	4	2.030.00 0	4	2.071.00 0	4	2.130.00 0	4	2.186.00 0	4	2.213.00 0
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	-	0	1	58.950.0 00	1	57.146.0 00	1	58.774.0 00	1	60.337.0 00	1	61.103.0 00
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	4	2.000.00 0	4	2.040.00 0	4	2.098.00 0	4	2.153.00 0	4	2.180.00 0
UPKP Wilayah Kembaran																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	712.844. 538	100%	898.460. 000	100%	916.698. 000	100%	942.824. 000	100%	967.903. 000	100%	980.196. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	KABUPATEN/KOT A	Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	49	49		49		50		50		50		50	
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang	73,62	75		78		79		80		81		82	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Daerah bernilai sedang - sangat tinggi			- sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%													
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.200.00 0	100%	7.200.00 0	100%	7.345.00 0	100%	7.555.00 0	100%	7.755.00 0	100%	7.855.00 0
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	Kumulati f		4	4	7.200.00 0	4	7.200.00 0	4	7.345.00 0	4	7.555.00 0	4	7.755.00 0	4	7.855.00 0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum	100%	100%	120.893. 321	100%	206.328. 783	100%	213.015. 000	100%	219.088. 000	100%	224.923. 000	100%	227.782. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					Perangkat Daerah													
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		1	1	751.000	1	1.118.30 0	1	1.141.00 0	1	1.180.00 0	1	1.225.00 0	1	1.240.00 0
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	17.061.1 21	2	27.751.5 83	2	28.314.0 00	2	29.120.0 00	2	29.894.0 00	2	30.280.0 00
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	22.008.0 00	4	20.668.0 00	4	21.087.0 00	4	21.687.0 00	4	22.260.0 00	4	22.542.0 00
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	77.208.0 00	12	143.680. 000	12	145.596. 000	12	149.745. 000	12	153.728. 000	12	155.680. 000
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		1	1	565.200	1	1.053.60 0	2	1.075.00 0	2	1.105.00 0	2	1.134.00 0	2	1.148.00 0
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		15	10	3.300.00 0	15	12.057.3 00	15	12.302.0 00	15	12.652.0 00	15	12.988.0 00	15	13.152.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.694.00 0	2	3.740.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.700.00 0	100%	30.300.0 00	100%	28.422.0 00	100%	29.230.0 00	100%	30.004.0 00	100%	30.384.0 00
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	30%	35%		35%		35%		40%		40%		40%	
2.11.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	-	0	1	2.500.00 0	1	2.555.00 0	1	2.627.00 0	1	2.695.00 0	1	2.729.00 0
2.11.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	2	1.700.00 0	2	16.800.0 00	1	14.644.0 00	1	15.061.0 00	1	15.460.0 00	1	15.656.0 00
2.11.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Unit	Kumulati f		3	-	0	3	11.000.0 00	2	11.223.0 00	2	11.542.0 00	2	11.849.0 00	2	11.999.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>																
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	581.321. 217	100%	613.621. 217	100%	626.076. 000	100%	643.919. 000	100%	661.047. 000	100%	669.442. 000
2.11.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	10.871.2 17	12	10.321.2 17	12	10.530.0 00	12	10.830.0 00	12	11.118.0 00	12	11.259.0 00
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	570.450. 000	12	603.300. 000	12	615.546. 000	12	633.089. 000	12	649.929. 000	12	658.183. 000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	1.730.00 0	100%	41.010.0 00	100%	41.840.0 00	100%	43.032.0 00	100%	44.174.0 00	100%	44.733.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitungan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)
					pemerintah daerah													
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	57%	57%		57%		60%		60%		60%		60%	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif		-	-	0	5	2.100.000	4	2.142.000	4	2.203.000	4	2.261.000	4	2.289.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif		2	2	1.730.000	2	5.510.000	3	5.621.000	3	5.781.000	3	5.934.000	3	6.009.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif		1	-	0	1	32.400.000	1	33.057.000	1	33.999.000	1	34.903.000	1	35.346.000
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	5	1.000.000	2	1.020.000	2	1.049.000	2	1.076.000	2	1.089.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
UPKP Wilayah Purwokerto																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	3.896.92 3.250	100%	5.176.50 0.000	100%	5.281.58 2.000	100%	5.432.10 8.000	100%	5.576.60 2.000	100%	5.647.42 4.000
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	49	49		49		50		50		50		50	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62	75		78		79		80		81		82	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.600.00 0	100%	12.000.0 00	100%	12.245.0 00	100%	12.600.0 00	100%	12.900.0 00	100%	13.065.0 00
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokum en	Kumulati f		4	4	9.600.00 0	4	12.000.0 00	4	12.245.0 00	4	12.600.0 00	4	12.900.0 00	4	13.065.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	571.079. 250	100%	1.225.53 9.000	100%	1.253.91 9.000	100%	1.289.65 4.000	100%	1.323.95 6.000	100%	1.340.77 4.000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	1.108.00 0	2	7.495.50 0	2	7.647.00 0	2	7.864.00 0	2	8.073.00 0	2	8.175.00 0
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	35.670.2 50	4	124.915. 500	4	127.451. 000	4	131.085. 000	4	134.571. 000	4	136.280. 000
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	70.506.0 00	4	189.264. 000	4	193.110. 000	4	198.613. 000	4	203.896. 000	4	206.485. 000
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	Kumulati f		12	12	454.425. 000	12	853.860. 000	12	871.193. 000	12	896.022. 000	12	919.856. 000	12	931.538. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Kantor yang Disediakan																
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	900.000	2	6.000.00 0	2	6.121.00 0	2	6.295.00 0	2	6.462.00 0	2	6.550.00 0
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		30	10	8.470.00 0	15	44.004.0 00	15	44.897.0 00	15	46.176.0 00	15	47.404.0 00	15	48.006.0 00
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.694.00 0	2	3.740.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	0	100%	115.989. 500	100%	114.843. 000	100%	118.115. 000	100%	121.255. 000	100%	122.793. 000
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	57%	0%		20%		25%		30%		35%		35%	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		barang miik daerah (RKBMD)																
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif		1	-	0	1	21.658.000	1	22.097.000	1	22.726.000	1	23.330.000	1	23.626.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif		2	-	0	2	80.231.500	1	78.360.000	1	80.593.000	1	82.736.000	1	83.786.000
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif		1	-	0	5	14.100.000	2	14.386.000	2	14.796.000	2	15.189.000	2	15.381.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.289.504.000	100%	3.465.396.500	100%	3.535.743.000	100%	3.636.511.000	100%	3.733.241.000	100%	3.780.652.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif		12	12	1.204.000	12	3.996.500	12	4.077.000	12	4.193.000	12	4.304.000	12	4.358.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulati f		12	12	3.288.30 0.000	12	3.461.40 0.000	12	3.531.66 6.000	12	3.632.31 8.000	12	3.728.93 7.000	12	3.776.29 4.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	26.740.0 00	100%	357.575. 000	100%	364.832. 000	100%	375.228. 000	100%	385.250. 000	100%	390.140. 000
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	60%	60%		65%		65%		65%		65%		65%	
2.11.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulati f		-	7	23.100.0 00	7 .Unit	94.200.0 00	7	96.112.0 00	7	98.851.0 00	7	101.480. 000	7	102.768. 000
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	Kumulati f		10	4	3.640.00 0	4	15.640.0 00	3	15.957.0 00	3	16.411.0 00	3	16.847.0 00	3	17.060.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Lainnya yang Dipelihara																
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	-	0	1	219.735. 000	1	224.195. 000	1	230.584. 000	1	236.760. 000	1	239.766. 000
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	1	28.000.0 00	1	28.568.0 00	1	29.382.0 00	1	30.163.0 00	1	30.546.0 00
UPKP Wilayah Sumpiuh																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	556.743. 850	100%	702.900. 000	100%	717.168. 000	100%	737.608. 000	100%	757.228. 000	100%	766.845. 000
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem	49	49		49		50		50		50		50	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas													
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62	75		78		79		80		81		82	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi	100%	100%	7.200.00 0	100%	7.200.00 0	100%	7.345.00 0	100%	7.555.00 0	100%	7.755.00 0	100%	7.855.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					keuangan Perangkat Daerah													
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	Kumulati f		4	4	7.200.00 0	4	7.200.00 0	4	7.345.00 0	4	7.555.00 0	4	7.755.00 0	4	7.855.00 0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	75.465.0 50	100%	131.303. 000	100%	137.466. 000	100%	141.389. 000	100%	145.146. 000	100%	146.992. 000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan	Paket	Kumulati f		2	2	1.417.00 0	2	2.622.00 0	2	2.675.00 0	2	2.760.00 0	2	2.833.00 0	2	2.868.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	n Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan																
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	2.433.75 0	2	4.570.50 0	2	4.663.00 0	2	4.795.00 0	2	4.922.00 0	2	4.984.00 0
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	14.827.5 00	4	38.200.5 00	4	38.975.0 00	4	40.085.0 00	4	41.151.0 00	4	41.673.0 00
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	56.125.0 00	12	79.710.0 00	12	81.328.0 00	12	83.645.0 00	12	85.869.0 00	12	86.959.0 00
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	661.800	2	1.700.00 0	2	1.734.00 0	2	1.783.00 0	2	1.830.00 0	2	1.860.00 0
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		30	-	0	15	4.500.00 0	15	4.591.00 0	15	4.721.00 0	15	4.846.00 0	15	4.907.00 0
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.600.00 0	2	3.695.00 0	2	3.741.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik	100%	100%	12.429.0 00	100%	65.107.0 00	100%	62.935.0 00	100%	64.727.0 00	100%	66.456.0 00	100%	67.299.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	57%	55%		55%		55%		55%		55%		55%	
2.11.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	-	0	1	5.500.00 0	1	5.611.00 0	1	5.770.00 0	1	5.923.00 0	1	5.998.00 0
2.11.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		2	1	5.875.00 0	2	45.607.0 00	1	43.040.0 00	1	44.266.0 00	1	45.443.0 00	1	46.020.0 00
2.11.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	5	6.554.00 0	5	14.000.0 00	2	14.284.0 00	2	14.691.0 00	2	15.090.0 00	2	15.281.0 00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan	100%	100%	457.299. 800	100%	480.626. 000	100%	490.381. 000	100%	504.356. 000	100%	517.771. 000	100%	524.346. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
2.11.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	10.419.8 00	12	14.576.0 00	12	14.871.0 00	12	15.294.0 00	12	15.700.0 00	12	15.899.0 00
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	446.880. 000	12	466.050. 000	12	475.510. 000	12	489.062. 000	12	502.071. 000	12	508.447. 000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.350.00 0	100%	18.664.0 00	100%	19.041.0 00	100%	19.581.0 00	100%	20.100.0 00	100%	20.353.0 00
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	57%	55%		55%		55%		55%		55%		55%	
2.11.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	<i>Jumlah Kendaraan Dinas</i>	<i>Unit</i>	<i>Kumulati f</i>		-	2	130.000	4	14.644.0 00	4	14.941.0 00	4	15.366.0 00	4	15.774.0 00	4	15.974.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulati f		3	3	4.220.00 0	3	1.220.00 0	3	1.244.00 0	3	1.279.00 0	3	1.313.00 0	3	1.329.00 0
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	-	0	1	1.500.00 0	1	1.530.00 0	1	1.573.00 0	1	1.614.00 0	1	1.634.00 0
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	5	1.300.00 0	2	1.326.00 0	2	1.363.00 0	2	1.399.00 0	2	1.416.00 0
UPKP Wilayah Wangon																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	737.926. 375	100%	888.516. 000	100%	906.552. 000	100%	932.389. 000	100%	957.191. 000	100%	969.347. 000
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan	49	49		49		50		50		50		50	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas													
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh	73,62	75		78		79		80		81		82	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					Pegawai ASN) x 100%													
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.200.00 0	100%	7.200.00 0	100%	7.345.00 0	100%	7.555.00 0	100%	7.755.00 0	100%	7.855.00 0
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	Kumulati f		4	4	7.200.00 0	4	7.200.00 0	4	7.345.00 0	4	7.555.00 0	4	7.755.00 0	4	7.855.00 0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	98.483.8 75	100%	164.349. 000	100%	170.183. 000	100%	175.038. 000	100%	179.700. 000	100%	181.985. 000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		1	1	537.000	2	1.584.50 0	2	1.616.00 0	2	1.662.00 0	2	1.715.00 0	2	1.736.00 0
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	1.669.87 5	2	19.932.5 00	2	20.337.0 00	2	20.925.0 00	2	21.481.0 00	2	21.760.0 00
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	24.891.0 00	4	28.162.0 00	4	28.733.0 00	4	29.551.0 00	4	30.337.0 00	4	30.722.0 00
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	66.586.0 00	12	102.670. 000	12	103.754. 000	12	106.710. 000	12	109.548. 000	12	110.939. 000
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		1	1	300.000	2	1.500.00 0	2	1.530.00 0	2	1.573.00 0	2	1.614.00 0	2	1.634.00 0
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		20	15	4.500.00 0	20	10.500.0 00	15	10.713.0 00	15	11.018.0 00	15	11.311.0 00	15	11.454.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.694.00 0	2	3.740.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	0	100%	33.355.0 00	100%	31.537.0 00	100%	32.434.0 00	100%	33.295.0 00	100%	33.717.0 00
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	100%	-		35%		35%		35%		35%		35%	
2.11.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	-	0	1	9.650.00 0	1	9.850.00 0	1	10.130.0 00	1	10.399.0 00	1	10.531.0 00
2.11.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	-	0	2	21.205.0 00	1	19.137.0 00	1	19.682.0 00	1	20.205.0 00	1	20.461.0 00
2.11.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Unit	Kumulati f		5	-	0	5	2.500.00 0	2	2.550.00 0	2	2.622.00 0	2	2.691.00 0	2	2.725.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>																
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	594.307. 500	100%	628.920. 000	100%	641.686. 000	100%	659.973. 000	100%	677.527. 000	100%	686.130. 000
2.11.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	6.720.00 0	12	6.720.00 0	12	6.856.00 0	12	7.051.00 0	12	7.238.00 0	12	7.329.00 0
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>Kumulati f</i>		12	12	587.587. 500	12	622.200. 000	12	634.830. 000	12	652.922. 000	12	670.289. 000	12	678.801. 000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	37.935.0 00	100%	54.692.0 00	100%	55.801.0 00	100%	57.389.0 00	100%	58.914.0 00	100%	59.660.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					pemerintah daerah													
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	57%	57%		57%		60%		60%		60%		60%	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif		-	3	0	5	5.742.000	4	5.858.000	4	6.024.000	4	6.184.000	4	6.262.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif		2	2	2.530.000	2	4.450.000	3	4.540.000	3	4.669.000	3	4.793.000	3	4.853.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif		-	1	35.405.000	1	43.500.000	1	44.383.000	1	45.647.000	1	46.861.000	1	47.456.000
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	3	1.000.000	2	1.020.000	2	1.049.000	2	1.076.000	2	1.089.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	419.779. 870	100%	587.676. 000	100%	599.605. 000	100.0 0%	616.694. 000	100%	633.098. 000	100.0 0%	641.139. 000
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	49	49		49		50		50		50		50	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62	75		78		79		80		81		82	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6.000.000	100%	7.200.000	100%	7.345.000	100%	7.555.000	100%	7.755.000	100%	7.855.000
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	Kumulatif		4	4	6.000.000	4	7.200.000	4	7.345.000	4	7.555.000	4	7.755.000	4	7.855.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	203.629. 870	100%	264.876. 000	100%	271.755. 000	100%	279.504. 000	100%	286.946. 000	100%	290.587. 000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	-	0	2	1.562.00 0	2	1.593.00 0	2	1.645.00 0	2	1.690.00 0	2	1.711.00 0
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	183.489. 360	2	227.535. 360	2	230.154. 000	2	236.713. 000	2	243.009. 000	2	246.095. 000
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		4	4	1.116.00 0	4	4.622.75 0	4	4.715.00 0	4	4.849.00 0	4	4.977.00 0	4	5.040.00 0
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	Kumulati f		12	12	2.915.00 0	12	3.935.00 0	12	4.019.00 0	12	4.133.00 0	12	4.242.00 0	12	4.295.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Kantor yang Disediakan																
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	-	0	1	450.000	1	460.000	1	473.000	1	495.000	1	501.000
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		30	30	16.109.5 10	15	26.770.8 90	15	27.314.0 00	15	28.092.0 00	15	28.839.0 00	15	29.205.0 00
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.694.00 0	2	3.740.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	49.800.0 00	100%	131.150. 000	100%	132.313. 000	100%	136.082. 000	100%	139.700. 000	100%	141.473. 000
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	30%	27%		20%		30%		30%		30%		30%	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		barang miik daerah (RKBMD)																
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif		-	-	0	1	1.100.000	1	1.122.000	1	1.153.000	1	1.183.000	1	1.198.000
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif		1	1	49.800.000	1	127.550.000	1	128.641.000	1	132.307.000	1	135.826.000	1	137.550.000
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif		-	-	0	2	2.500.000	2	2.550.000	2	2.622.000	2	2.691.000	2	2.725.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	148.850.000	100%	164.200.000	100%	167.533.000	100%	172.307.000	100%	176.889.000	100%	179.135.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif		12	12	38.600.000	12	40.000.000	12	40.812.000	12	41.975.000	12	43.091.000	12	43.638.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulati f		12	12	110.250. 000	12	124.200. 000	12	126.721. 000	12	130.332. 000	12	133.798. 000	12	135.497. 000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	11.500.0 00	100%	20.250.0 00	100%	20.659.0 00	100%	21.246.0 00	100%	21.808.0 00	100%	22.089.0 00
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	54%	55%		55%		55%		55%		55%		55%	
2.11.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulati f		-	-	0	1	2.250.00 0	1	2.295.00 0	1	2.360.00 0	1	2.422.00 0	1	2.458.00 0
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	Kumulati f		10	10	11.500.0 00	8	14.140.0 00	8	14.427.0 00	8	14.838.0 00	8	15.232.0 00	8	15.425.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Lainnya yang Dipelihara																
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	1	3.080.00 0	1	3.142.00 0	1	3.231.00 0	1	3.316.00 0	1	3.358.00 0
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	1	780.000	1	795.000	1	817.000	1	838.000	1	848.000
UP TPST/TPA BLE																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100%	100%	6.301.88 5.092	100%	4.963.34 2.487	100%	5.064.09 8.000	100%	5.208.42 5.000	100%	5.346.96 9.000	100%	5.414.87 5.000
		Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem	49	49		49		50		50		50		50	

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas													
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	Progres Positif	IKM tahun n	89,625	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Jumlah total realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran dalam DPA dikali 100	98,18	95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	73,62	75		78		79		80		81		82	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan	100%	100%	9.600.00 0	100%	9.600.00 0	100%	9.796.00 0	100%	10.075.0 00	100%	10.345.0 00	100%	10.480.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					Perangkat Daerah													
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawa ban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	Progres Positif	Jumlah anggaran yang dipertanggungj awabkan (SPJ) tepat waktu / jumlah anggaran yang diajukan (NPD) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.11.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	Kumulati f		4	4	9.600.00 0	4	9.600.00 0	4	9.796.00 0	4	10.075.0 00	4	10.345.0 00	4	10.480.0 00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.436.85 9.260	100%	1.037.41 5.655	100%	1.058.47 8.500	100%	1.088.64 9.000	100%	1.117.60 8.000	100%	1.131.79 7.000
		Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	43,29	45		49		55		58		60		65	
2.11.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan	Paket	Kumulati f		-	4	16.842.0 00	2	10.512.5 00	2	10.725.0 00	2	11.030.0 00	2	11.325.0 00	2	11.468.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
		Kantor yang Disediakan																
2.11.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	52.853.2 10	2	120.821. 155	2	121.273. 000	2	124.729. 000	2	128.046. 000	2	129.672. 000
2.11.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulati f		2	2	25.536.0 00	4	33.418.0 00	4	34.100.0 00	4	35.071.0 00	4	36.005.0 00	4	36.462.0 00
2.11.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulati f		12	12	2.333.65 3.050	12	836.064. 000	12	851.536. 000	12	875.804. 000	12	899.100. 000	12	910.518. 000
2.11.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulati f		-	-	0	2	200.000	2	206.500	2	220.000	2	225.000	2	227.000
2.11.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulati f		15	5	7.975.00 0	15	36.400.0 00	15	37.138.0 00	15	38.196.0 00	15	39.212.0 00	15	39.709.0 00
2.11.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	Kumulati f		-	-	0	-	0	1	3.500.00 0	1	3.599.00 0	2	3.695.00 0	2	3.741.00 0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik	100%	100%	11.705.0 00	100%	84.417.5 00	100%	86.129.0 00	100%	88.583.0 00	100%	90.939.0 00	100%	92.092.0 00

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	38%	40%		45%		50%		50%		55%		55%	
2.11.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulati f		1	-	0	1	12.484.0 00	1	12.737.0 00	1	13.100.0 00	1	13.448.0 00	1	13.618.0 00
2.11.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		2	2	11.705.0 00	2	15.393.5 00	2	15.705.0 00	2	16.152.0 00	2	16.581.0 00	2	16.791.0 00
2.11.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulati f		-	1	0	2	56.540.0 00	2	57.687.0 00	2	59.331.0 00	2	60.910.0 00	2	61.683.0 00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan	100%	100%	3.460.52 8.332	100%	3.504.57 8.332	100%	3.575.72 0.000	100%	3.677.62 7.000	100%	3.775.45 1.000	100%	3.823.39 8.000

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
					jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
2.11.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulati f		12	12	527.383. 332	12	569.378. 332	12	580.936. 000	12	597.492. 000	12	613.385. 000	12	621.174. 000
2.11.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulati f		12	12	2.933.14 5.000	12	2.935.20 0.000	12	2.994.78 4.000	12	3.080.13 5.000	12	3.162.06 6.000	12	3.202.22 4.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	383.192. 500	100%	327.331. 000	100%	333.974. 500	100%	343.491. 000	100%	352.626. 000	100%	357.108. 000
		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	Progres Positif	Barang Milik Daerah kondisi baik / jumlah barang milik daerah total x 100%	70%	70%		71%		73%		74%		76%		77%	
2.11.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	Kumulati f		-	-	0	10	2.000.00 0	10	2.040.00 0	10	2.098.00 0	10	2.153.00 0	10	2.180.00 0

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tipe Perhitu ngan	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
2.11.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulati f		30	30	235.448. 500	30	221.835. 000	30	226.338. 000	30	232.788. 000	30	238.980. 000	30	242.020. 000
2.11.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		1	1	147.744. 000	1	98.496.0 00	1	100.495. 000	1	103.359. 000	1	106.108. 000	1	107.455. 000
2.11.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	Progres Positif		-	-	0	1	5.000.00 0	1	5.101.50 0	1	5.246.00 0	1	5.385.00 0	1	5.453.00 0

4.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. IKU ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Penetapan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan, diharapkan Perangkat Daerah dapat memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	75,49	75,54	75,58	75,63	75,67	75,71	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	71,78	71,88	71,98	72,08	72,18	72,28	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,77	85,78	85,79	85,8	85,81	85,82	
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	62,87	62,88	62,89	62,9	62,91	62,92	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	70,32	74,19	78,28	82,57	87,06	89,37	
6	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	77,05	78,51	80,48	83,51	87,19	91,06	

4.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. IKK disusun secara sistematis dan terukur untuk mencerminkan hasil atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keberadaan indikator ini sangat penting sebagai dasar dalam proses pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang berbasis data dan kinerja, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	Angka	75,49	75,54	75,58	75,63	75,67	75,71	
2	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	28	28	27	27	26	
3	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/ Kota	%	80,99	85,74	90,50	95,25	100	100	

BAB V PENUTUP

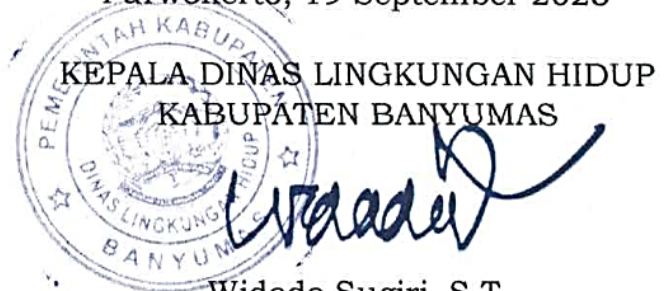
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Lingkungan Hidup menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 19 September 2025



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

Widodo Sugiri, S.T.

NIP. 19710610 200312 1 005

LAMPIRAN

Tabel 4.5. Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE / TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Kewajiban penyediaan 20% RTH Publik yang menjadi kewajiban Pemerintah akan sulit tercapai	DLH; Masyarakat	Pembangunan RTH dan penanaman pohon di beberapa tanah Pemda yang menjadi ruang publik, di lapangan-lapangan serta di jalur hijau jalan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1.Melibatkan stakeholder dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH serta dalam kegiatan penanaman pohon; 2.Menyusun dokumen masterplan pembangunan RTH.	Kepala Dinas	1. 2025-2029 2. 2026-2027	DLH
						KSM tidak melakukan perawatan sarana prasarana pengelolaan sampah dengan baik (mitra)	Proses perawatan sarpras dan pemilahan sampah secara manual oleh KSM di TPST/TPS3R/PDU tidak maksimal	Timbulnya kerusakan bangunan, armada, dan mesin pengolah sampah.	DLH; Masyarakat	SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah di KSM	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi SOP pemeliharaan sarana prasarana pengolah sampah dan kebijakan pemanfaatan aset daerah	Kepala Dinas	2025 - 2029	DLH

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE / TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
						Penumpukan output pengolahan sampah (bahan RDF dan Biomassa) di TPA BLE	Kurangnya sarana pengolahan bahan rdf dan biomassa di TPA BLE	kemungkinan munculnya pencemaran lingkungan	DLH; Masyarakat	Melakukan pengembangan TPA BLE dan kerjasama dengan offtaker pemanfaat RDF dan Biomassa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penyusunan dokumen FS/ DED dan meningkatkan koordinasi dengan off taker	Kepala Dinas	2025 - 2029	DLH
						Sampah tidak terkelola dengan baik	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat	DLH; Masyarakat	Melakukan pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu, tengah, hilir	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Kepala Dinas	2025 - 2029	DLH

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE / TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
						Pencemaran air dan udara	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi pengendalian pencemaran air dan udara	Penurunan kualitas air dan udara	DLH; Masyarakat	Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan, melakukan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air dan udara	Kepala Dinas	2025-2029	DLH
						Terjadinya perubahan iklim	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pengendalian perubahan iklim	Peningkatan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim	DLH; Masyarakat	Melakukan pembinaan pengendalian perubahan iklim baik kepada masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim	Kepala Dinas	2025-2029	DLH

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE / TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
						Penurunan kualitas lingkungan hidup	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	terjadinya penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan adanya pencemaran, perubahan iklim, serta penurunan kesehatan masyarakat	DLH; Masyarakat	Memasukkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen-dokumen perencanaan lingkungan hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan lingkungan hidup (Penyusunan KLHS baik KLHS RTR maupun KLHS RPJMD, Evaluasi Dokumen D3TLH dan RPPLH)	Kepala Dinas	2026 - 2029	DLH
						Belum terkelolanya keanekaragaman hayati	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati	DLH; Masyarakat	Melakukan inventarisasi data dan penyusunan profil keanekaragaman hayati	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati	Kepala Dinas	2026	DLH

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE / TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
						Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup	terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup	DLH; Masyarakat	Penilaian, monitoring dan evaluasi sekolah adiwiyata, pembentukan saka kalpataru, fasilitasi penghargaan kalpataru, dan inventarisasi serta pemberdayaan kelompok masyarakat adat yang melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Perbup Adiwiyata, Evaluasi Tim Pembina Saka Kalpataru, Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat	Kepala Dinas	2025-2026	DLH